



Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

# KOMINFO next



Edisi 17  
Mei 2020



9 772655 933008

## MENUJU **NEW NORMAL**



# TIM REDAKSI

**Pengarah:**  
Rosarita Niken  
Widiastuti

**Wakil Pengarah:**  
Philip Gobang

**Pemimpin Redaksi:**  
Ferdinandus Setu

**Wakil  
Pimpinan Redaksi:**  
Daoni Diani Hutabarat

**Redaktur Pelaksana**  
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur  
Pelaksana:**  
Viskayanesya

**Redaktur:**  
Frans Bambang Irawan,  
M. Taufiq Hidayat,  
Verawati

**Reporter:**  
Patricia Samantha S.  
Annisa Bonita P.,  
Yusuf

**Fotografer:**  
Agus Yudi Harsono,  
Doni Paulus Sumule,  
Sri Indrati Novinarsari  
Indra Kusuma

**Desain & Layout:**  
Adista Winda Rizka,  
Rahma Aulia Indroputri,  
Lamdza Rachmattunisa,  
Tommy Tirtawiguna

**Produksi:**  
Fahmi Trihatin J.,

# Menuju Normal Baru

Pandemi COVID-19 membuka mata kita semua akan pentingnya aspek kesehatan, kebersihan, dan disiplin diri. Krisis ini mengajarkan kita untuk beradaptasi dan berinovasi dalam standar kehidupan yang baru. Memasuki era *New Normal*, era Adaptasi Kebiasaan Baru berarti tidak bisa hanya berdiam diri. Roda perekonomian harus kembali digerakkan. Untuk itu, semua hal baik yang kita ciptakan dan kita laksanakan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak boleh kita lupakan, bahkan terus kita tingkatkan.

Adaptasi Kebiasaan Baru, berarti kita kembali aktif. Aktif untuk berkreasi dan berinovasi di setiap lini kehidupan kita. Setiap anak bangsa diharapkan dapat menggali seluruh kemampuan yang dimiliki, namun tetap dengan tidak melupakan semua standar kesehatan dan keamanan yang kita praktikkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kita harus tetap patuh untuk menjaga jarak, kita harus tetap rajin mencuci tangan pakai sabun, kita harus tetap rajin memakai masker. Apa pun jenis dan bahannya, kita tak boleh mengabaikan masker ketika berada di luar rumah.

Untuk membangkitkan lagi Indonesia, Presiden kita Bapak Joko Widodo sudah menerapkan protokol Adaptasi Kebiasaan Baru, Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengemban amanah untuk ikut mengawal dengan menyediakan informasi yang penting melalui segala jenis saluran komunikasi.

Kita sudah meluncurkan Sistem Terintegrasi untuk Bersatu Lawan COVID-19. Kita memiliki website dan chatbot Whatsapp: covid19.go.id yang menjadi rujukan informasi valid mengenai penanganan pandemi bagi masyarakat dan juga aplikasi PeduliLindungi yang dilengkapi Digital Diary; dan menggunakan GPS Technology

dan yang sudah diunduh oleh banyak orang. Saya mengajak lebih banyak masyarakat untuk mengunduh melalui Play Store dan Apps store. Semakin banyak yang mengunduh semakin baik agar kita dapat melakukan pencegahan lebih dini reaktif dari COVID-19. Mari kita manfaatkan itu semua agar kita satu irama, satu tujuan, dalam upaya bersama Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19.

Kita saksikan bersama, betapa para *stakeholder* komunikasi dan informatika dengan kompak bersatu padu menyiapkan skenario normal baru. Para operator seluler memastikan jaringan tetap aman untuk masyarakat yang bekerja dan belajar dari rumah. Di masa *New Normal*, tentu gaya hidup digital ini tidak hilang begitu saja. Para startup kita juga melahirkan inovasi-inovasi luar biasa supaya kegiatan ekonomi bisa berjalan secara online. UMKM kita bisa tetap hidup dalam ekosistem digital, bisnis tetap jalan dan orang-orang tetap bisa mencari nafkah.

Menteri Johnny G. Plate pernah mengatakan bahwa hal ini tidaklah mudah, tapi bukannya tidak mungkin, selama kita sebagai bangsa Indonesia kembali pada semangat gotong royong yang senantiasa menjadi jati diri bangsa kita.

Dalam semangat itulah, kami ketengahkan Majalah Kominfo Next Edisi Mei 2020 ini ke hadapan sidang pembaca. Selamat membaca, dan pastikan diri kita selalu siap untuk menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19.

Ferdinandus Setu  
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



@FSetu



@FSetu



FSetu TV

# Daftar Isi

---

2 Surat dari MMB 9

4 Perspektif  
Menteri

6 Sejarah  
Pandemi

14 Arahan  
Presiden

16 Liputan  
Utama

42 Aksi Pemerintah

56 Opini

68 HARKITNAS

74 Gugus  
Tugas

88 Menuju  
Normal Baru

92 Aksi  
Masyarakat

94 Kontribusi  
POS

96 Layanan Psikologi SEJIWA

# Membangun dan Membarui “Habitus”

Beberapa minggu lalu, ketika kita masih dalam tahap memikirkan berbagai cara terbaik untuk meminimalisir dampak digitalisasi yang berkembang cepat, datanglah terjangan pandemi COVID-19. Pandemi yang menimbulkan multikrisis ini “memaksa” semua lapisan masyarakat untuk berpaling ke penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Masyarakat, dalam berbagai lapisan, tak bisa memilih lagi. Mereka harus menghindari ganasnya penyebaran virus tersebut dengan cara mengalihkan sebagian besar kegiatan ke ranah daring (*online*). Kiranya fragmen atau meme video pendek yang viral seperti karya-karya Mas “Ucup Klaten” dengan menampilkan tokoh “Mbah Minto”-nya cukup menggambarkan hal itu dengan gamblang. Baik sebagai medium atau sebagai konten itu sendiri, video seperti ini berhasil menyampaikan pesan kuat tentang kelaziman baru di ranah digital.

Bahkan ranah-ranah yang sakral, seperti pelaksanaan ibadah keagamaan pun, tak luput dari terjangan virus ini. Meski dalam beberapa kasus menimbulkan diskusi hangat, namun umumnya masyarakat kita dapat menerima kondisi genting tersebut dan menginternalisasinya menjadi kelaziman baru, *new normal*.

Hal yang sama juga terjadi dalam ranah luring (*offline*). Dari kebiasaan kita yang “cuek” terhadap kebersihan tubuh, terutama bagian tangan, tiba-tiba menjadi sadar dan peduli. Sabun dan *sanitizer* tangan adalah barang-barang yang paling diburu dalam masa pandemi ini. Sikap-sikap higienis lain juga dengan sigap kita adaptasi, seperti menjaga jarak, mengonsumsi vitamin, menjaga stamina dan imunitas, menjaga kebersihan sekitar, dan sebagainya.

Pertanyaannya: apakah semua hal tersebut adalah hal-hal yang sama sekali baru?

Konon ada adagium: *nothing new under the sun*. Kira-kira maksudnya adalah: tak ada barang yang sama sekali baru di dunia ini.

Demikian juga dengan *new normal* yang menjadi praktik kita sehari-hari selama pandemi. Tidak ada yang benar-benar baru. Sebelum virus Corona menyerang, kita sudah menjadi bangsa yang tingkat adopsi teknologi digitalnya relatif tinggi, ditunjukkan dengan pemanfaatan media sosial dan *instant messaging* untuk berkomunikasi dan berbisnis. Webinar yang tiba-tiba *booming* sebelumnya juga sudah banyak digunakan oleh kalangan akademis dan bisnis. Aplikasi-aplikasi virtual meeting juga menjadi *booming* karena sebelumnya sudah banyak digunakan untuk keperluan rapat atau berkoordinasi. Jadi begitu terjadi pembatasan kehadiran fisik, mereka segera memanfaatkan apa yang sudah lazim digunakan selama ini.

Bahkan jika kita melihat banyak rumah atau toko menyediakan air dan sabun pencuci tangan saat ini, maka ada beberapa teman yang jadi teringat nostalgia masa kecil mereka di pedesaan Jawa. Di halaman rumah masyarakat Jawa zaman dulu sering tersedia gentong berisi air untuk minum dan membersihkan diri bagi pelancong yang lewat.

Demikian pula, imbauan untuk cuci tangan dengan benar dan sering itu juga merupakan imbauan utama ketika terjadi pandemi flu pada tahun 1918.

Jadi tak perlu khawatir dengan apa yang disebut dengan *new normal*. Selama beberapa bulan ini kita sudah menerapkannya dan relatif berjalan baik, karena memang tak ada hal yang sama sekali baru yang belum pernah kita pelajari.

Yang kita perlukan untuk benar-benar baru adalah kesadaran dan kedisiplinan. Ini harus benar-benar baru dan dinaikkan levelnya. Yang kita perlukan adalah pembaruan habitus atau kebiasaan atau perwatakan.

Bagi yang merasa saat ini sudah dalam level kesadaran dan kedisiplinan yang memadai untuk menghadapi penyebaran virus ganas ini, perbarui lagi. Bagi yang belum, tak ada pilihan lagi, semua harus dalam level kesadaran yang sama. Tak bisa ada sebagian orang yang apatis dan tidak mau peduli, apalagi bekerja sama.

Sayangnya, golongan oknum yang tidak memedulikan



ketahanan bersama itu masih banyak kita dapati dalam praktik sehari-hari. Contoh paling kentara adalah pada kasus-kasus di mana mereka tak mau diingatkan akan *physical distancing* atau aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Belum lagi yang aktif menyebarkan informasi-informasi yang melemahkan kebersamaan dalam menghadapi krisis ini.

Untuk itulah pemerintah menyediakan koridor regulasi untuk memastikan bahwa *new normal* ini dihadapi dengan solid dan adil bagi semua. Presiden Joko Widodo sendiri turun ke lapangan untuk melihat kesiapan penegakan dan sosialisasi aturan. Dengan itu Presiden menyampaikan pesan bahwa situasi *new normal* adalah keniscayaan yang harus dihadapi.

Sementara itu masyarakat diharapkan memiliki habitus baru dengan level kesadaran yang tinggi. Pemerintah menyediakan berbagai protokol untuk diikuti agar transisi ke *new normal* berlangsung dengan solid. Pemerintah juga menyiapkan aturan dan bahkan aparat penegak hukum agar protokol-protokol tersebut ditaati bersama dan adil. Namun, yang paling utama, sekali lagi, adalah mendisiplinkan diri kita masing-masing, membangun habitus baru, atau membarui habitus baik yang telah ada.

OBJECT: 765-WW-269E-7 NUMBER: AU  
 CN-10201  
 Webster & Stevens 6 Sejarah Pandemi  
 65-WW 269 B 9  
 PHOTOGRAPHER  
 WCO Dec., 18 TAKES  
 DESCRIPTION:  
 FIGHTING INFLUENZA IN SEATTLE.  
 Flu serum injection, Seattle, Wash.

# Dunia Melawan Pandemi



Sejarah

ISSUE: 11

NOTES: 11-2014



**Enam bulan berlalu sejak kasus pertama penyakit COVID-19 muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 lalu.** Dalam rentang waktu tersebut, COVID-19 telah menyebar ke 216 negara di dunia dengan total kasus terkonfirmasi mencapai lebih dari 5 juta orang. Persebaran COVID-19 yang semakin meluas di seluruh dunia membuat World Health Organization (WHO) menetapkan wabah yang disebabkan oleh novel coronavirus ini sebagai global pandemic pada 11 Maret 2020 lalu.



Sumber Foto : National Archives

# 1. The Black Death

**The Black Death** terjadi di Eropa dan Asia pada pertengahan abad ke-14. Penyebab dari penyakit ini yaitu bakteri yang hidup di tikus dan menular ke manusia melalui perantara gigitan. Wabah ini masuk ke Eropa ketika 12 kapal yang baru saja berlayar dari Laut Hitam, berlabuh di Pelabuhan Messina, Italia. Kapal-kapal ini dipenuhi dengan pelaut yang telah meninggal karena penyakit misterius, sedangkan para pelaut yang masih hidup, mereka dalam kondisi sakit keras. Walaupun otoritas pelabuhan sudah meminta kapal tersebut untuk pergi dari pelabuhan, namun mewabahnya penyakit ini di Eropa tidak bisa dihindarkan.

**Setelah Messina**, Black Death mulai menjangkit di Pelabuhan Marseilles, Prancis; Tunisia di Afrika Utara; dan disusul kota-kota yang menjadi pusat perdagangan seperti Roma dan Florence. Hingga pada tahun 1348, penyakit ini sudah mewabah hingga Paris, Bordeaux, Lyon dan London. Selama 5 (lima) tahun, wabah ini telah menyebabkan korban meninggal sebanyak 20 juta orang di Eropa.

Seorang penyair Italia, Giovanni Boccaccio, yang hidup di tengah wabah Black Death menggambarkan, orang yang menderita penyakit ini mengalami pembengkakan sebesar buah apel atau telur di pangkal paha atau bawah ketiak. Kemudian akan muncul demam, kedinginan, muntah, diare, sakit dan nyeri hingga akhirnya penderita akan meninggal. Bakteri penyebab Black Death ini menginfeksi

sistem getah bening dan menyebabkan pembengkakan. Jika tidak lekas ditangani, infeksi akan menyebar ke darah hingga paru-paru. Lima abad setelah wabah ini melumpuhkan Eropa, pada Abad 19 seorang ahli biologi berkebangsaan Perancis, Alexander Yersin berhasil mengidentifikasi bakteri penyebab wabah ini yang kemudian dinamakan Yersinia Pestis.

Pihak berwenang di Kota Ragusa, Italia, merilis laporan resmi tentang keberhasilan penanganan dengan memperlambat penyebaran wabah ini. Mereka melakukan isolasi kepada para pelaut yang baru sampai di pelabuhan sampai dengan mereka dinyatakan bersih dan tidak membawa penyakit. Isolasi yang dilakukan para pelaut ini dilakukan di kapal mereka masing-masing

selama 30 hari yang kemudian diperpanjang menjadi 40 hari. Dalam bahasa Italia, periode 40 hari ini disebut sebagai *quarantine*, dan hingga saat ini, istilah *quarantine* masih terus dipakai untuk merujuk pada aktifitas isolasi untuk mencegah penularan penyakit.

Berdasarkan laporan dari World Health Organization, setiap tahunnya masih ditemukan 1000 sampai dengan 3000 kasus penyakit ini.



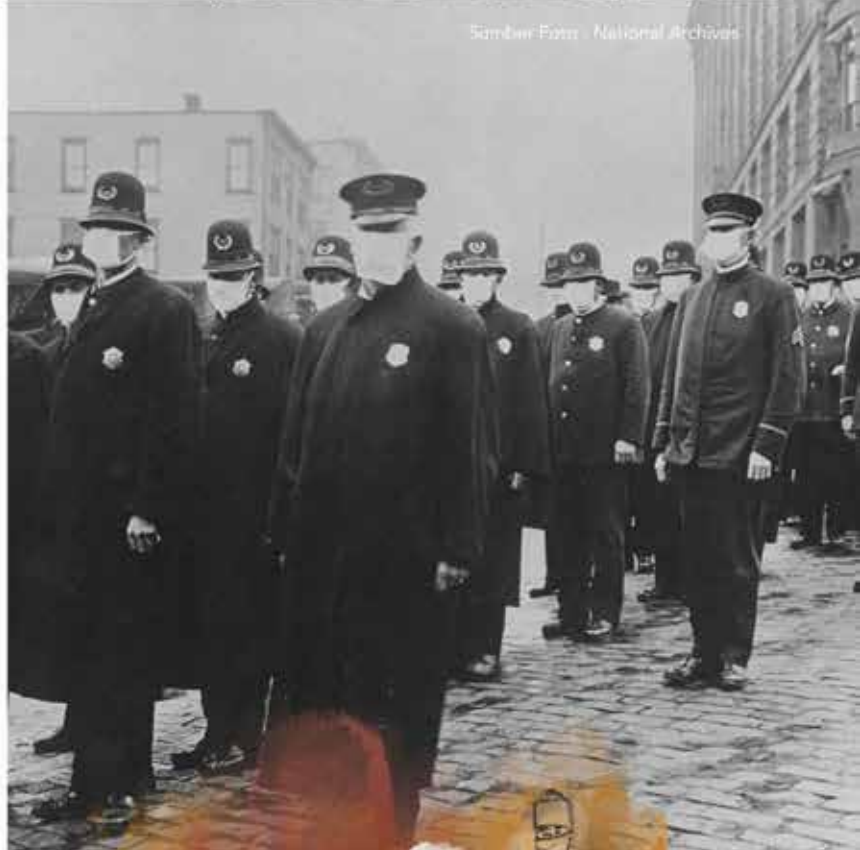
## 2. The Spanish Flu

**The 1918 Influenza Pandemic** atau dikenal sebagai The Spanish Flu merupakan pandemi paling parah yang pernah terjadi di dunia. Pandemi ini menginfeksi kurang lebih 500 juta orang di seluruh dunia dan menimbulkan korban hingga mencapai kurang lebih 50 juta. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan bersama dari mana virus ini berasal. Beberapa hipotesa mengenai asal muasal virus ini—dari wabah di medan Perang Dunia I di Eropa, penyakit pernafasan yang mewabah di Provinsi Shanxi, China, hingga penyakit flu yang terjadi di kamp militer di Kansas, Amerika Serikat—belum diyakini 100% oleh para ahli sebagai asal virus ini. Namun, satu hal yang bisa dipastikan bahwa virus ini bukan berasal dari Spanyol.

Lantas mengapa pandemi ini disebut sebagai Spanish Flu? Tahun 1918 merupakan tahun di mana negara-negara di Eropa dan Amerika terlibat Perang Dunia I. Dalam kondisi perang, tidak memungkinkan bagi pihak-pihak yang bertikai mengumumkan bahwa sedang terjadi pandemi di wilayahnya yang menyebabkan korban jiwa. Hal ini dikhawatirkan bisa menurunkan mentalitas prajurit di medan perang dan tentunya juga, informasi tentang kekuatan personil militer suatu negara dapat terungkap ke pihak musuh. Sehingga semua negara yang sedang berperang saat itu membatasi untuk tidak mempublikasikan adanya pandemi di wilayahnya.



Sambir Faza - National Archives





Berbeda dengan Spanyol yang saat itu tidak terlibat dalam Perang Dunia I, sehingga tidak ada alasan baginya untuk menutupi informasi bahwa telah terjadi pandemi dengan korban jiwa di wilayahnya. Bahkan Raja Spanyol ketika itu, Raja Alfonso XIII, juga menderita penyakit ini. Dengan adanya publikasi dari Spanyol, maka Eropa dan Amerika Serikat memberikan julukan pandemi flu ini dengan Spanish Flu.

Virus ini merupakan virus influenza (flu) yang menyerang sistem pernafasan, di mana potensi penularannya sangat tinggi. Seseorang yang terinfeksi Spanish Flu akan mengalami gejala serupa gejala flu, yaitu demam, kedinginan dan kelelahan. Gejala-gejala ini akan reda dalam beberapa hari.

Namun berbeda saat terjadi gelombang kedua pandemi Spanish Flu. Gejala-gejala flu tersebut diikuti dengan kulit yang membiru serta paru-paru korban yang dipenuhi cairan. Gejala lanjutan ini menimbulkan peningkatan angka kematian di masa gelombang kedua Spanish Flu.

Pada saat terjadinya pandemi ini, belum ada obat ataupun vaksin yang efektif untuk mengatasi virus ini. Para dokter dan ilmuwan belum bisa memastikan apa yang menjadi penyebab pandemi dan bagaimana mengatasinya. Vaksin flu sendiri secara resmi baru diproduksi di Amerika pada tahun 1940.

Permasalahan yang lebih kompleks terjadi ketika para tenaga medis juga harus bertugas dalam Perang Dunia I, sehingga ketersediaan tenaga medis

untuk merawat warga sipil yang terdampak pandemi menjadi sangat terbatas.

Dengan kondisi yang serba belum pasti, hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi Spanish Flu pada saat itu yaitu melalui tindakan pencegahan. Masyarakat diwajibkan menggunakan masker. Sekolah, pusat bisnis, pusat hiburan ditutup untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap tinggal di rumah, menghindari berjabat tangan, serta larangan untuk meludah.

Dalam catatan sejarah, Indonesia (ketika itu bernama Hindia) tidak lepas dari dampak pandemi flu ini. Pemerintah Hindia Belanda mencatat bahwa virus ini masuk ke Indonesia pada Juli 1918, dibawa oleh penumpang kapal dari Malaysia dan Singapura dan menyebar melalui Sumatera Utara. Pemerintah dan penduduk ketika itu tidak memperhatikan bahaya dari Spanish Flu karena masih berfokus untuk menangani penyakit menular lain seperti kolera, pes, dan cacar. Sampai dengan akhir tahun 1918, Spanish Flu sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan memakan korban mencapai 1,5 juta jiwa.

Pertengahan tahun 1919, pandemi ini berakhir ketika masyarakat yang terinfeksi virus meninggal atau bertahan dengan berkembangnya imunitas tubuh.



Sumber Foto : National Archives

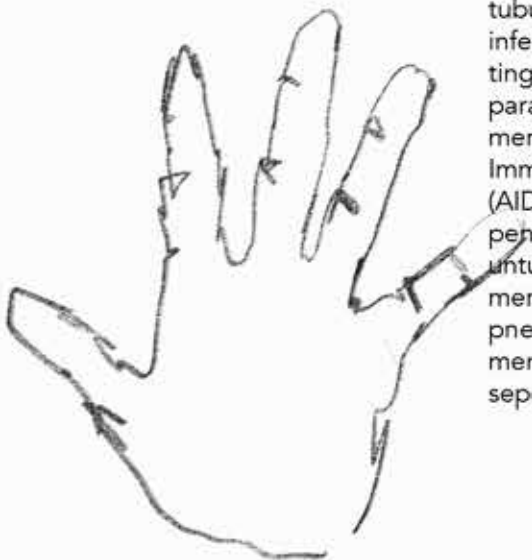


### 3. HIV / AIDS

**Human Immunodeficiency Virus (HIV)** merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, secara spesifik menyerang sel yang bernama sel CD4. Sel CD4 yang diserang oleh HIV akan hancur sehingga menyebabkan tubuh tidak bisa melawan infeksi dan penyakit. Pada tingkat infeksi yang sudah parah, HIV akan bertransformasi menjadi Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) yang menyebabkan penderita memiliki risiko tinggi untuk terserang penyakit mematikan seperti kanker dan pneumonia. Penyakit ini menular melalui cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan

vagina, cairan anal, dan Air Susu Ibu (ASI). Penularan sebagian besar terjadi melalui hubungan seks bebas, penggunaan jarum suntik secara bersama, serta melalui kelahiran.

Para peneliti berhasil melacak asal muasal dari virus ini yang ternyata berasal dari simpanse. Pada tahun 1999, peneliti mengidentifikasi virus yang ditemukan pada simpanse yang bernama Simian Immunodeficiency Syndrome (SIV). Virus ini memiliki gejala yang sama dengan HIV yaitu menyerang sistem kekebalan tubuh. Para peneliti percaya



bahwa pandemi HIV/AIDS yang melanda dunia, bermula saat virus ini menular dari simpanse ke manusia pada tahun 1920 di Kota Kinsasha, Republik Demokratik Kongo. Penularan dari simpanse ke manusia ini terjadi ketika manusia memakan simpanse ataupun darah simpanse yang terinfeksi masuk ke luka di tubuh manusia.

Virus ini menular keluar Benua Afrika ketika para professional Haiti di Republik Demokratik Kongo pulang ke negaranya di Kawasan Karibia, Kemudian, dari Kawasan Karibia, virus ini terus menyebar ke New York, San Francisco, dan kota-kota lain di Amerika Serikat, hingga akhirnya virus ini menyebar melalui perjalanan internasional dari Amerika Serikat ke seluruh negara di dunia.

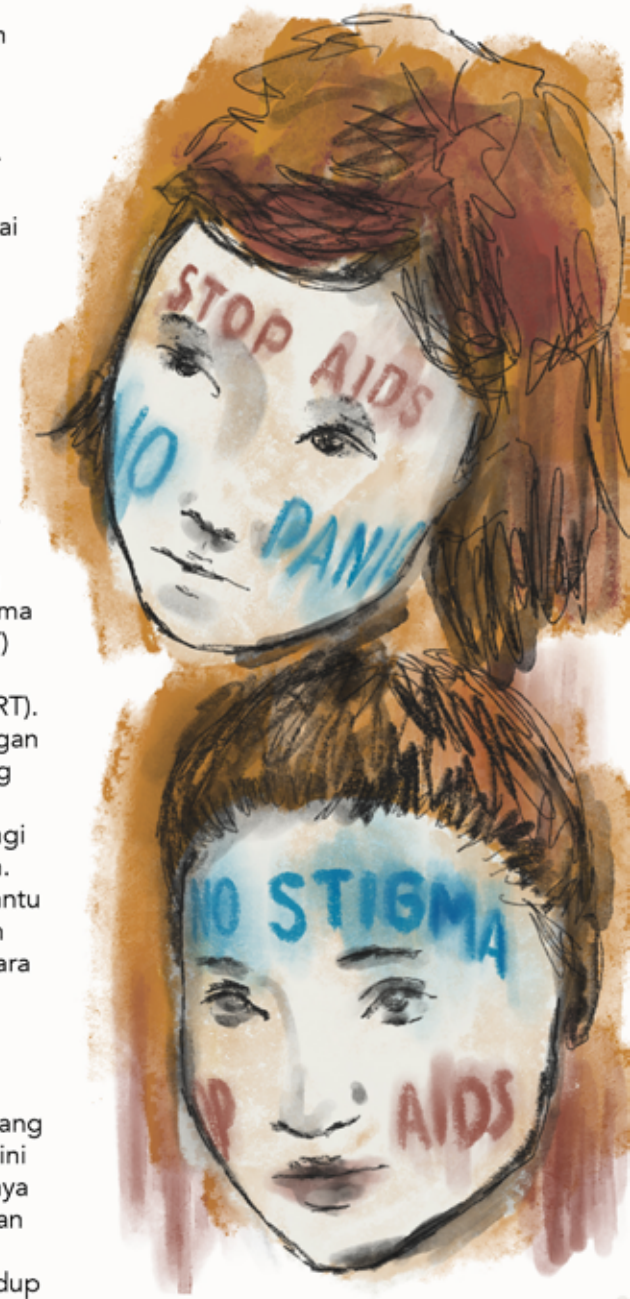
Penyebaran dan infeksi virus ini belum dipandang serius oleh masyarakat dunia, hingga pada tahun 1981 ketika The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mempublikasikan temuan tentang lima pria homoseksual yang sebelumnya dinyatakan sehat, tiba-tiba terserang *pneumonia* yang disebabkan oleh *pneumocystis jirovecii* yang sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia dengan sistem kekebalan tubuh normal.

Pada tahun berikutnya, New York Times melaporkan bahwa penyakit kelainan kekebalan tubuh ini telah menginfeksi 335 orang, dengan 136 di antaranya meninggal dunia. Pada tahun 1982, CDC secara resmi menyebut penyakit ini

sebagai AIDS, dan walaupun CDC menemukan bahwa kelainan ini tidak hanya menyerang kaum homoseksual, namun sekitar tahun 1980-an publik memandang AIDS ini sebagai gay disease, bahkan ada yang menyebutnya sebagai *gay plague*.

Tahun 1987, obat antiretroviral untuk mengobati HIV ditemukan. Obat ini dikenal dengan nama Azidothymidine (AZT). Saat ini, sudah banyak jenis pengobatan untuk HIV yang biasanya dikenal dengan nama Antiretroviral Therapy (ART) maupun Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART). Pengobatan ini bekerja dengan mencegah virus berkembang biak, sehingga bisa memberikan kesempatan bagi kekebalan tubuh untuk pulih. Pengobatan ini juga membantu mengurangi risiko penularan HIV seperti dalam kasus antara ibu yang terinfeksi dengan anaknya yang belum lahir.

Sejak awal HIV/AIDS ini muncul, sebanyak 75 juta orang tercatat terinfeksi oleh virus ini dan 32 juta orang di antaranya meninggal dunia. Dari catatan WHO pada tahun 2018, sebanyak 37,9 juta orang hidup dengan mengidap virus ini di seluruh dunia.



#### Referensi:

<https://www.history.com/news/pandemics-end-plague-cholera-black-death-smallpox>  
<https://www.history.com/topics/middle-ages/pandemics-timeline>  
<https://www.history.com/topics/middle-ages/black-death>  
<https://www.history.com/topics/world-war-i/1918-flu-pandemic>  
<https://historia.id/sains/articles/seabad-flu-spanyol-DBKbm>  
<https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/great-plague/>  
<https://www.history.com/topics/1980s/history-of-aids>

# Panduan "Kenormalan Baru"

Bagi Pelaku Usaha pada  
Sektor Jasa dan Perdagangan



1 Melakukan **disinfeksi** area kerja dan publik **setiap 4 jam sekali**.

2 **Kampanyekan** Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3 Mewajibkan **memakai masker** bagi pekerja dan konsumen.

4 Menyediakan **fasilitas cuci tangan** dan **hand sanitizer**.

5 Melakukan **pengecekan suhu badan** di pintu masuk.

6 Memasang **media informasi** penanganan Covid-19.

7 Melakukan **pembatasan jarak fisik** minimal 1 meter:

- Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja.
- Pengaturan jumlah pekerja yang masuk.
- Pengaturan meja kerja, tempat duduk.

8 Melakukan upaya untuk **meminimalkan kontak dengan konsumen**:

- Menggunakan pembatas/partisi.
- Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai.



9 **Mencegah kerumunan konsumen**:

- **Mengontrol jumlah konsumen yang masuk.**
- **Menerapkan sistem antrian** di pintu masuk dan **menjaga jarak minimal 1 meter.**
- Memberikan **tanda di lantai** untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik.
- **Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon** untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan.
- **Menetapkan jam layanan**, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.



## Sumber :

Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

“  
**Tugas kita belum  
berakhir,  
beradaptasi bukan  
berarti menyerah,  
apalagi kalah.**

Tapi mengubah perilaku  
dengan kebiasaan-  
kebiasaan baru sesuai  
dengan protokol  
kesehatan.”

*Joko Widodo*  
Presiden RI



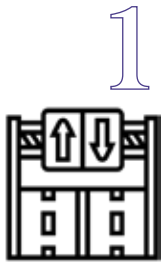


# Tiga Arahan Terbaru Presiden

Terkait  
Penanganan  
Pandemi  
COVID-19

Sumber Foto : [presidenri.go.id](https://presidenri.go.id)

**P**residen Joko Widodo memimpin rapat terbatas secara telekonferensi dengan jajarannya untuk membahas percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 27 Mei 2020. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden memberikan tiga arahan terbaru bagi para menteri maupun Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.



Dalam arahan pertamanya, Presiden meminta jajarannya mengendalikan arus balik agar tidak terjadi sirkulasi bolak-balik dalam penyebaran virus korona yang berpotensi untuk memunculkan gelombang kedua, utamanya di wilayah Jabodetabek.

“ Karena Saya melihat, data terakhir tadi pagi, tren untuk  $R_0$  maupun  $R_t$  dari DKI Jakarta sudah di bawah satu, sehingga ini perlu terus kita tekan agar lebih menurun lagi.

$R_0$  : Basic reproduction number. Angka yang menunjukkan daya tular sebuah virus/bakteri/penyakit dari seseorang ke orang lain.

$R_t$  : Effective reproduction number



Kepala Negara ingin agar Gugus Tugas dan kementerian juga fokus kepada provinsi dengan kasus baru yang cukup tinggi. Di Jawa misalnya, Presiden secara khusus meminta agar Provinsi Jawa Timur diberikan dukungan penuh, terutama yang berkaitan dengan kesiapan rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat.

“ Ini Pak Menteri Kesehatan, juga Ketua Gugus Tugas, betul-betul Saya minta (agar) Jawa Timur menjadi perhatian. Kemudian juga yang berkaitan dengan percepatan pengujian sampel, pelacakan untuk yang terpapar (COVID-19) di Jawa Timur betul-betul dilakukan langkah-langkah pengendalian. Termasuk juga provinsi yang lain di luar Jawa yang penambahannya masih cukup tinggi yaitu di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, di Sumatera Selatan, di Papua, di NTB.



Presiden meminta agar target pengujian spesimen dapat dikejar. Untuk diketahui, dalam beberapa rapat terbatas sebelumnya Presiden meminta agar dilakukan uji spesimen COVID-19 sebanyak 10.000 per hari.

“ Kemudian yang ketiga, Saya minta target uji spesimen 10.000 per hari, yang sudah Saya berikan target beberapa bulan yang lalu, agar ini dikejar sehingga betul-betul ada sebuah kecepatan.

Sumber :

<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/tiga-arahan-terbaru-presiden-terkait-penanganan-pandemi-covid-19/>


# Berdamai, Bergerak Menuju Adaptasi Baru

Setelah melewati perjuangan selama lebih dari dua bulan sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk mulai berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona. "Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Frase berdamai yang digunakan Presiden Jokowi memiliki makna penyesuaian baru dalam tatanan kehidupan. Hidup berdampingan di tengah-tengah virus yang belum ditemukan vaksinnnya memang akan menjadi tatanan baru, atau yang sering disebut sebagai konsep *new normal*. Masyarakat tetap melawan penyebaran virus sambil beraktivitas seperti sediakala.







Prinsip *new normal* adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmita, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19.

"Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini," kata Wiku.

Dalam Rapat Terbatas mengenai Persiapan Pelaksanaan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan

Aman COVID-19, Rabu, (27/5/2020), Presiden Jokowi turut menekankan agar pemerintah secara aktif mensosialisasikan protokol adaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Edisi kali ini akan membahas kesiapan pemerintah dalam mendorong adaptasi masyarakat menuju tatanan normal baru dari tiga pendekatan, yaitu pemulihan di bidang ekonomi, kesehatan, dan sosial.





## Presiden: Sosialisasikan Protokol Tatanan Normal Baru Secara Masif

Presiden Joko Widodo meminta agar protokol mengenai tatanan normal baru yang sudah disiapkan Kementerian Kesehatan dapat segera disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Pengenalan yang lebih dini dan masif dari protokol tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat agar tetap produktif dan aman di tengah pandemi COVID-19.

Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai persiapan pelaksanaan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 27 Mei 2020.

“Tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini agar disosialisasikan secara masif sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak,” ujarnya.

Sehari sebelumnya Kepala Negara telah meninjau kesiapan menuju tatanan normal baru

dengan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan di sarana publik dan perniagaan. Pelaksanaan pendisiplinan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota dengan melibatkan anggota TNI dan Polri yang akan senantiasa mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menerapkan protokol kesehatan selama pandemi.

“Aparat dari TNI dan Polri telah diterjunkan ke titik-titik keramaian di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan normal baru yang akan kita lihat dari angka-angka dan fakta-fakta di lapangan, utamanya yang berkaitan dengan R0 dan Rt. Apabila ini nanti efektif, kita akan gelar dan lebankan lagi ke provinsi dan kabupaten/kota yang lain,” kata Presiden.

Tatanan normal baru produktif dan aman tersebut, Presiden melanjutkan, nantinya akan terlebih dahulu dimulai di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dengan indikator R0 yang sudah di bawah satu. Angka indikator tersebut di bawah satu tersebut dapat dipahami bahwa penularan dan pertumbuhan kasus COVID-19 semakin melambat

dan cenderung dapat dikendalikan.

“Kita coba di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki R0 yang sudah di bawah satu dan pada sektor-sektor tertentu yang kita lihat di lapangan bisa mengikuti tatanan normal baru yang ingin kita kerjakan,” tuturnya.

Selain itu, yang tak kalah penting, Kepala Negara menegaskan untuk memastikan tingkat kesiapan setiap daerah dalam mengendalikan virus ini sebelum bersiap menuju fase produktif dan aman sebagai sebuah normal baru. Bagi daerah yang diketahui memiliki angka penyebaran COVID-19 yang masih tinggi, Presiden meminta jajaran terkait untuk memberi perhatian khusus dan melakukan pengujian sampel serta pelacakan yang agresif dengan diikuti isolasi yang ketat untuk menekan kurva penularan.

“Saya kemarin sudah perintahkan kepada Gugus Tugas, Panglima TNI, dan Kapolri untuk di Jawa Timur misalnya agar ditambah bantuan aparat di sana agar bisa menekan kurvanya sehingga tidak naik lagi dan memasifkan pengujian sampel, pelacakan yang agresif terhadap yang PDP maupun ODP, dan melakukan isolasi yang ketat. Ini kita lakukan pada provinsi-provinsi yang kurvanya masih naik,” tandasnya.

R0 : Basic reproduction number. Angka yang menunjukkan daya tular sebuah virus/bakteri/penyakit dari seseorang ke orang lain.

Rt : Effective reproduction number



Sumber: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presidentri-sosialisasikan-protokol-tatanan-normal-baru-secara-masif/>

# Menyelamatkan Manusia dari Pandemi

Masa pandemi COVID-19 belum jua terlewati. Dampaknya begitu besar, baik di sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Agar tak terimbas kian dalam, diterbitkan serangkaian kebijakan *extraordinary*. Anggaran negara diprioritaskan pada tiga hal: kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, dan perlindungan dunia usaha. Sebab, fokus utama pemerintah adalah menyelamatkan berbagai sisi dari manusia.

Kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendukung penanggulangan COVID-19. Demikian dituturkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama. Secara responsif, Kementerian Keuangan memberikan sejumlah insentif perpajakan, bahkan ketika pandemi baru merebak.

"Pertama, insentif kepada pelayanan kesehatan. Yang kedua, terkait jaring pengaman sosial, kita mendukung upaya peningkatan daya beli masyarakat. Ketiga, dukungan kepada kegiatan usaha supaya mereka bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dalam kondisi sulit ini," terang pria yang meraih gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California tersebut.

Namun demikian, Hestu menekankan pentingnya menjaga kepatuhan wajib pajak selama periode pemberian insentif. "Jangan kemudian muncul euforia lupakan dulu pajak lantaran kegiatan usaha melemah. Kita harus tetap menjaga tingkat kepatuhan masyarakat dan pengusaha wajib pajak."

Sumber: Majalah Media Keuangan Edisi Juni 2020.  
Penulis: Reni Saptiati D.I

## Beragam insentif pajak

Sejak awal April beragam insentif dilahirkan, sebagian termuat dalam PMK 28/2020. "PMK 28 merupakan insentif perpajakan untuk sektor kesehatan," ungkap Hestu. Dari segi subjek, ada tiga pihak yang diberi insentif, yaitu instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk oleh instansi pemerintah atau rumah sakit tadi untuk mendukung penanganan COVID-19.

Dari segi objek, barang yang dimaksud ialah obat, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, APD, perawatan untuk pasien, dan pendukung lainnya. "Ada juga jasa untuk penanganan COVID-19, misalnya jasa sewa tempat bagi pasien isolasi," tambah Hestu. Atas barang dan jasa tersebut, diberikan pembebasan PPh 22 impor dan PPN-nya, pembebasan PPh 22, pembebasan PPh 21, serta pembebasan PPh 23.

"Kita juga ada PMK yang bersama Ditjen Bea Cukai, yaitu PMK 34/2020. Pajak dalam rangka impor tidak dipungut dulu karena dibutuhkan kecepatan atas pengadaan barang-barang yang dalam kondisi normal juga diperlukan tapi tidak sebanyak sekarang," ujar Hestu.

Dunia UMKM tak luput dari perhatian. Pemerintah menanggung PPh final 0,5 persen bagi pelaku UMKM untuk masa pajak April hingga September 2020. "Kenapa tidak dinolkan? Karena kita menjaga kepatuhan. Skemanya ditanggung pemerintah, tetapi mereka ada kewajiban tetap mencatat," tegas Hestu. Sosialisasi kebijakan ini dilakukan antara lain melalui *email blast* kepada sekitar 2,1 juta pelaku UMKM.

Dalam konteks mendukung dunia usaha, Hestu menyatakan pemerintah telah menurunkan PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2020. "Kita langsung bergerak supaya dampak penurunan tarif langsung efektif di tahun ini," ungkapnya. Oleh sebab itu, sejak April hingga Desember, tarif PPh Badan yang diterapkan sudah di besaran 22 persen.

Tak hanya itu, PMK 44/2020 juga hadir memberi insentif bagi hampir seluruh sektor usaha. Aturan tersebut menyebutkan kebijakan PPh 21 ditanggung pemerintah untuk 1.062 bidang industri, pembebasan PPh 22 impor untuk 431 bidang industri, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30 persen untuk 846 bidang industri, dan restitusi PPN dipercepat untuk 431 bidang industri. Seluruhnya berlaku sejak April hingga September 2020. "Mengapa enam bulan? Insentif fiskal tidak berjalan sendiri. Kita sinkronkan dengan skema besar penanganan COVID-19 yang diterapkan sekitar enam bulan dulu."

## Dukung produksi hand sanitizer

Kelangkaan *hand sanitizer* dan disinfektan sudah terjadi sejak bulan Maret, bahkan sebelumnya. Padahal keduanya dibutuhkan dalam jumlah sangat banyak dan cepat. "Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) segera merespons dengan memperluas subjek yang mendapat fasilitas pembebasan etil alkohol," ungkap Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto. Hingga 8 Mei 2020 saja, total etil alkohol yang diberikan pembebasan cukai mencapai 68.596.360 liter untuk sektor komersial dan 322.770 liter untuk sektor nonkomersial. "Jika tidak dibebaskan, tarif per liternya Rp20.000," sebut Nirwala.

Hingga awal Mei, total pengguna fasilitas dari sektor nonkomersial sudah mencapai 56 entitas, salah satunya Universitas Brawijaya. Ketua Satgas COVID-19 Universitas Brawijaya dr. Aurick Yudha Nagara, Sp.EM mengaku sangat terbantu dengan fasilitas tersebut. "Kami jelas merasakan manfaatnya," ujarnya.

Universitas Brawijaya membentuk Satgas COVID-19 dan meramu berbagai kegiatan, termasuk penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). "Kami menggunakan protokol yang ada di rumah sakit, yaitu penyediaan *hand sanitizer*. Rencananya beli sendiri, tetapi ternyata *cost-nya* mahal.

Usut punya usut, Fakultas Pertanian ternyata memiliki mesin produksi. Lalu, komposisinya dari teman-teman Farmasi dan pengujiannya oleh teman-teman Mikrobiologi di Fakultas Kedokteran," cerita dokter spesialis *emergency medicine* tersebut.

Awalnya, *hand sanitizer* tersebut ditujukan untuk penggunaan internal kampus, termasuk mahasiswa profesi di rumah sakit pendidikan yang jumlahnya mencapai 700 orang. Namun, kemudian *hand sanitizer* tersebut juga dipasok ke rumah sakit pendidikan, pondok pesantren, lapas di area Malang, serta beberapa instansi pemerintah. "Produksi tetap akan kami lanjutkan karena ancaman COVID-19 masih terus ada," ungkapnya.

Kebijakan DJBC lainnya ialah fasilitas penundaan pembayaran cukai. Pemesanan pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pabrik pada 9 April-9 Juli 2020 diberikan penundaan pembayaran selama 90 hari. "Per 30 April 2020, sudah 78 pabrik memanfaatkan fasilitas penundaan pembayaran cukai dengan nilai cukai lebih dari Rp10,5 triliun," kata Nirwala. Selain itu, DJBC juga menerbitkan relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar.

kita bayarkan 65 persen. Tapi begitu daerah melakukan perbaikan, DAU langsung kita salurkan dikesempatan pertama tidak menunggu bulan berikutnya," jelas Astera. Ia menyebut langkah itu manjur meningkatkan kepatuhan daerah.

"Ini suatu hal yang saya rasa baik. Sebenarnya kapasitas daerah untuk menangani COVID-19 masih ada, dalam arti mereka masih memiliki *space*, sepanjang mereka disiplin dalam melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran," tutur Astera. Hingga minggu kedua bulan Mei, *space* dimaksud sudah di kisaran Rp57 triliun dan angkanya masih akan terus bergerak. "Ini meningkatkan kepercayaan diri. Kita yakin daerah masih punya kemampuan untuk menangani COVID-19," tutupnya.

## Dorong Penda lakukan *refocusing*

"Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga memiliki *concern* pada tiga hal tadi. Mulai dari kesehatan, bantuan sosial, hingga penguatan ekonomi, termasuk di dalamnya UMKM," Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menegaskan. Secara garis besar, terdapat empat pokok kebijakan TKDD dalam penanganan COVID-19, yakni penyesuaian alokasi TKDD, *refocusing* TKDD, relaksasi penyaluran TKDD, dan *refocusing* belanja APBD agar fokus pada penanganan COVID-19.

Perpres 54/2020 mengamanatkan penyesuaian atau penghematan alokasi TKDD. "Total penghematan TKDD sekitar Rp94,2 triliun. Dari angka itu, kita harapkan daerah bisa melakukan realokasi dan *refocusing* untuk intervensi penanganan COVID-19, terutama bagi tiga hal utama tadi," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara tersebut.

Pihaknya meminta daerah untuk melakukan perhitungan kembali anggarannya. Untuk mempercepat penyesuaian APBD, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB). Hingga awal Mei, Astera menyatakan daerah yang patuh dengan SKB tersebut masih sedikit.

"Saat awal SKB, ada sekitar 380 daerah yang terpaksa kita berikan sanksi. DAU-nya hanya terpaksa kita berikan perbaikan, DAU langsung kita salurkan dikesempatan pertama tidak menunggu bulan berikutnya," jelas Astera. Ia menyebut langkah itu manjur meningkatkan kepatuhan daerah.

PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020

# KEBIJAKAN PAJAK

MENGHADAPI DAMPAK COVID-19

Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan.

Pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, salah satunya dengan memberikan kebijakan pajak.



**Penurunan Tarif PPh Badan**  
Secara Bertahap

Tarif umum turun dari 25% menjadi:

**22%**  
↓ 2020  
↓ 2021

**20%**  
↓ mulai  
↓ 2022

**19%**  
↓ 2020  
↓ 2021

**17%**  
↓ mulai  
↓ 2022

Tarif PPh Badan Go Public\* 3% lebih rendah dari tarif umum.

\*Batas pengembalian yang diperbolehkan 9%



**Perlakuan Pajak Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

- Pengisian PPh atas impor barang tidak terwujud dan jasa
- Pengisian PPh/pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang memeski ketetapan kehadiran signifikan
- Tata cara lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan



**Perpanjangan Jangka Waktu**

Pengajuan oleh Wajib Pajak dan Penyelesaian oleh DJP



**Bagi Wajib Pajak**

Perubahan ketentuan diperpanjang menjadi 9 bulan



**Bagi DJP**

Perpanjangan jangka waktu penyelesaian:

- Perubahan revisi melalui pemeriksaan menjadi 12 bulan
- Perubahan keberatan menjadi 12 bulan
- Perubahan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi menjadi 12 bulan
- Perubahan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak atau pembatalan hasil pemeriksaan menjadi 12 bulan

Khusus untuk penyelesaian pemisahan lebih bayar pajak diperpanjang 1 bulan dari 1 menjadi 2 bulan

## Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Upaya Pemerintah Bantu UMKM dan Dunia Usaha

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memengaruhi kondisi perekonomian nasional yang terus berlanjut hingga saat ini. Data dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I yang hanya sebesar 2,97 persen menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam. Hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi -0,4 persen.

Selain itu, Pandemi COVID-19 juga memberikan tekanan pada perekonomian baik dari sisi *supply* dan *demand*, dimana kinerja ekonomi menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terhambat, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang juga ikut melambat dan menurun.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 untuk meminimalisir dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat, dunia usaha termasuk usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM sendiri merupakan sektor strategis perekonomian, hal ini dikarenakan peran besar UMKM yang berkontribusi terhadap perekonomian sekitar 57%, tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional dan jumlah sektor informal yang bergerak di sektor UMKM juga masih sangat besar.

Salah satu upaya pemerintah membantu dunia usaha, UMKM dan usaha ultra mikro serta sektor usaha strategis bagi perekonomian termasuk BUMN adalah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN menjadi bentuk dukungan terhadap UMKM dan stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa total dana Program PEN mencapai Rp. 641,17 triliun.



## Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2020 (PP 23/2020) diharapkan mampu melindungi perekonomian agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19, dimana usaha terdampak akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program PEN.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa tujuan dari Program PEN ini adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Program PEN ditujukan untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut serta meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh dunia usaha akibat COVID-19. Saat Pandemi berangsur tertangani, PEN diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional", tambah Kepala BKF.

Sementara itu, berdasarkan PP 23/2020, Program PEN dapat dilakukan melalui mekanisme penempatan dana, penjaminan, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan investasi pemerintah. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional melalui belanja negara.

Mengutip rilis Kementerian Keuangan, dikatakan bahwa pemerintah telah merampungkan desain dua Program PEN. Pertama, Pemerintah akan memberikan fasilitas subsidi bunga kepada debitur perbankan, bank perkreditan/pembiayaan rakyat, dan perusahaan pembiayaan, juga kepada debitur KUR, koperasi, dan lembaga penyalur kredit lainnya. Kedua, Pemerintah juga telah menyiapkan program pemberian dukungan restrukturisasi melalui penempatan dana pada perbankan yang telah melakukan restrukturisasi kredit dan memberikan tambahan modal kerja kepada debiturnya.

Untuk mendukung usaha ultra mikro dan UMKM, Pemerintah mendukung penundaan pembayaran kredit dan menganggarkan subsidi bunga sebesar Rp34,15 triliun yang akan menjangkau 60,66 juta rekening. Kebijakan subsidi bunga ini merupakan bantuan keringanan kepada usaha ultra mikro dan UMKM yang memiliki pinjaman di lembaga

keuangan agar dapat bertahan meski peredaran usahanya menurun signifikan.

Selain memberikan subsidi bunga untuk mendukung perbankan dan lembaga pembiayaan yang melaksanakan restrukturisasi kredit UMKM dan menyalurkan tambahan kredit modal kerja baru, pemerintah juga akan melakukan penempatan dana di perbankan. Bank peserta maupun bank pelaksana merupakan bank yang sehat berdasarkan penilaian OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Kebijakan Program PEN sendiri dirumuskan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam merumuskan kebijakan tersebut juga melibatkan kementerian/ lembaga terkait lainnya.

Untuk memastikan Program PEN berjalan sesuai dengan tujuannya, PP 23/2020 mengatur prinsip pelaksanaan program PEN yang terdiri atas asas keadilan sosial, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mendukung Pelaku Usaha, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel, tidak menimbulkan moral hazard; dan adanya pembagian risiko dan biaya (*cost and risk sharing*) antar pemangku kepentingan.



# 5 Skema Pelindungan dan Pemulihan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan ada lima skema yang digunakan untuk melindungi dan memulihkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang terkena dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- 1 Pelaku UMKM miskin dan rentan yang masuk kategori penerima Bansos.
- 2 Insentif pajak bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp. 4,8 miliar per tahun dimana tarif PPH final nol persen selama enam bulan periode April - September 2020.
- 3 Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi KUMKM, melalui penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit. Skema ini juga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk KUR, UMi, PNM, Mekaar, LPDB KUMKM, dan lainnya. Selain itu, cicilan bunga kredit UMKM juga ditunda selama enam bulan ke depan untuk pinjaman UMKM sebesar Rp500 juta ke bawah. Sementara untuk kredit Rp500 juta sampai Rp10 miliar, perlu kerja sama dengan pihak perbankan.
- 4 Perluasan pembiayaan modal kerja KUMKM. Data Kemenkop UKM menunjukkan, ada 23 juta KUMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan.
- 5 Kementerian, BUMN dan Pemda sebagai penyangga produk KUMKM; terutama bagi para pelaku KUMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga.

Untuk memperluas Program Warung Tetangga, Kementerian Koperasi dan UKM telah menggandeng dua BUMN yaitu PT. Berdikari (Persero) dan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics yang sebelumnya telah menyatakan siap mendistribusikan penjualan telur sebanyak 5.040 kilogram untuk memenuhi dan mendukung program Warung Tetangga dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut Menteri Teten, terdapat dua langkah penanganan dampak ekonomi KUMKM, yakni di masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Di masa pandemi, tertuang dalam lima skema tadi, ditambah dengan e-Learning melalui edukukm.id dan pelatihan melalui webinar oleh Smesco.

Di masa pasca pandemi, Kementerian Koperasi dan UKM menggulirkan program Kakak Asuh UMKM dan Konvoi Produk Nasional yang dijalankan oleh Smesco. Ada juga perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, khususnya bagi UMKM yang belum mendapat akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

“Tak ketinggalan, ada program penguatan modal kerja koperasi oleh LPDB KUMKM serta digitalisasi UMKM dan koperasi”, jelas Teten.

Terkait digitalisasi UMKM, Teten menyebutkan ada beberapa permasalahan yang ditemui, di antaranya UMKM yang tidak memiliki infrastruktur digital (modem internet dan ponsel pintar), kekurangan dana untuk mengakses internet dan membeli pulsa, serta tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai dunia digital.

Oleh karena itu, Menteri Teten mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan akses

internet dan akses ke platform digital. “Tujuannya, membantu UMKM *offline* untuk memiliki perangkat yang diperlukan untuk dapat mengakses dunia digital”, ujar Menteri Koperasi dan UKM.

Langkah berikutnya adalah dengan memberikan literasi digital dengan tujuan membekali UMKM dengan pengetahuan digital yang memadai untuk meningkatkan daya saing. Pelatihan e-learning ini mencakup pelatihan kewirausahaan, manajemen koperasi, kejuruan (*vocational*) dan standardisasi secara *online* di masa pandemi COVID-19. Pelatihan ini juga akan dilengkapi dengan kuis sebagai indeks pengujian akhir agar peserta dapat memperoleh Surat Keterangan *online* untuk dapat digunakan pada fasilitas lanjutan di Kementerian Koperasi dan UKM.

“Dalam implementasinya, kita akan memberikan literasi digital kepada UMKM *offline* disertai pendampingan dan pendaftaran ke platform digital”, ujar Teten.





## Hadapi COVID-19, Pemerintah Luncurkan Enam Program Bantuan Tambahan

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. Presiden juga menyampaikan bahwa semua merasakan dampak dari pandemi COVID-19 baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi.

“Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah,” kata Presiden saat memberikan keterangan pers mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi Virus Korona (COVID-19) di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (9/4/2020). Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden telah menyampaikan program bantuan yakni:

**1**

Kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima, dengan total anggaran Rp 37,4 triliun.

**2**

Kartu Sembako yang diberikan kepada 20 juta penerima dengan masing-masing mendapat Rp200.000 per bulan. Total anggaran Rp43,6 triliun.

**3**

Kartu Prakerja, berupa insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan, yang sudah diberikan kepada 5,6 juta penerima. Total anggaran Kartu Prakerja yang disiapkan sebesar Rp20 triliun.

**4**

Pembebasan tarif listrik 450 VA bagi 24 juta pelanggan dan diskon tarif listrik untuk 900 VA bagi 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun.

Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan tambahan lainnya yaitu:

1

Bantuan Sosial yang baru, yaitu Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI (Jakarta). "Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK, dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun," tambah Presiden.

2

Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK, sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan, dengan total anggaran Rp1 triliun.

3

Untuk masyarakat di luar Jabodetabek, akan diberikan Bantuan Sosial Tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako. "Sekali lagi, kepada 9 juta KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun," kata Presiden.

4

Alokasi sebagian Dana Desa untuk bantuan sosial di desa, yang diberikan kepada sekitar 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggaran yang disiapkan Rp21 triliun.

5

Memperkuat Program Padat Karya Tunai di berbagai kementerian dengan total anggaran sebesar Rp16,9 triliun. "(Program Padat Karya) Ini nanti di Kementerian Desa, targetnya 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR targetnya 530 ribu tenaga kerja, dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun," ujar Presiden

Jokowi. Program ini juga ada di kementerian lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.

6

Program Keselamatan oleh Polri yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. "Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kernet, akan diberikan insentif Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar," ujar Presiden.

Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah bantuan sosial, memperluas ruang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. "Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya," katanya. Kepala Negara juga mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu. "Dengan bergotong-royong secara nasional kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan," katanya.



Sumber Foto : Antara Foto

## Pandemi COVID-19 Tuntut Masyarakat Hidup Normal yang Baru



Sejak WHO menetapkan pandemi COVID-19, pemerintah merespons cepat dengan menerbitkan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah dan gunakan masker. Hal tersebut kemudian diikuti dengan penetapan pandemi COVID-19 sebagai Bencana Nasional Non-Alam.

Penanganan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan secara terpimpin oleh pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 4 Provinsi dan 22 Kabupaten/Kotamadya. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona untuk mencegah kemungkinan penyebaran makin meluas. Pasalnya, pandemi COVID-19 telah berdampak secara multidimensional. Karenanya, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh sektor untuk bersatu padu, bahu membahu, dan bergotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan guna memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo memberikan 6 (enam) arahan, yaitu :



**Pertama**, pengujian sampel harus dilaksanakan lebih masif serta diikuti isolasi yang ketat. Kemenkes, BUMN, TNI-Polri telah bersinergi untuk meningkatkan jumlah lab pengujian sampel dan meningkatkan kapasitas pemeriksaan, sehingga target 10 ribu sampel/hari bisa dicapai.



**Kedua**, sarana dan prasarana konsultasi medis sudah dibuka secara luas dengan *telemedicine*. Layanan ini bisa digunakan sebagai sarana untuk menjaga kita tetap sehat, mendapatkan informasi yang benar dan mengurangi risiko untuk berkunjung ke rumah sakit.



**Ketiga**, pemerintah melaksanakan komunikasi yang efektif dengan penjelasan yang transparan kepada masyarakat baik terkait rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, data dan lain-lain.



**Keempat**, penegakan hukum dengan bantuan aparat negara agar masyarakat memiliki kepatuhan dan kedisiplinan untuk tetap di rumah dalam rangka mengurangi sebaran dan kontak dekat.



**Kelima**, pemerintah memastikan arus logistik berkaitan kebutuhan masyarakat berlangsung lancar baik pusat ke daerah maupun dari gudang logistik ke masyarakat.



**Keenam**, pemerintah berkomitmen penuh untuk memberikan paket stimulus ekonomi yang tepat sasaran sebagai bagian dari jaring pengaman sosial agar fokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19 bisa dilakukan semua pihak.

COVID-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat, berdiam diri di rumah, jaga jarak fisik dengan orang lain, memakai masker jika harus ke luar rumah dan rajin cuci tangan serta dengan gotong royong yang dilakukan bersama-sama dan terus menerus. Semangat gotong royong antar masyarakat harus dilakukan, salah satunya diwujudkan dalam bentuk aksi kepedulian dan solidaritas terhadap sesama.

## Layanan Interactive Voice Response (IVR) 321

Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyampaikan bahwa virus COVID-19 tidak bisa hilang dalam waktu singkat dan menjadi masalah di seluruh dunia. Oleh karena itu, tatanan hidup normal yang baru perlu diterapkan oleh masyarakat. COVID-19 telah berdampak luas diseluruh aspek kehidupan. Hal ini diperkuat dengan belum ditemukannya vaksin pengobatan COVID-19, untuk itu masyarakat harus menerapkan cara hidup baru yang mengedepankan protokol kesehatan yang disiplin, benar dan ketat. Untuk itu, pemerintah berharap masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19. Guna mendukung upaya ini, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang beberapa pengecualian dalam moda transportasi serta mengizinkan masyarakat berusia di bawah 45 tahun untuk kembali bekerja di dalam kerangka hidup baru.

Dalam beberapa waktu terakhir, banyak saudara-saudara kita yang terpaksa tidak bisa bekerja, harus kehilangan pekerjaan dan sudah barang tentu menimbulkan permasalahan-permasalahan bukan hanya sosial, ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam ketertiban. Oleh karena itu, kita harus mulai berubah dengan cara berpikir yang baru dengan bersikap yang baru, agar tetap produktif dan aman dari COVID-19.

# 321

Masyarakat diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk berdampingan dengan pandemi COVID-19. Kita harus mengubah budaya dasar kita menuju budaya dasar yang baru atau menuju ke kehidupan normal yang baru, juga perubahan perilaku, di mana perubahan perilaku merupakan hal yang sangat penting untuk menekan penyebaran COVID-19.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan USAID dan PT. XL Axiata menyediakan layanan Interactive Voice Response (IVR) 321 sebagai salah satu media edukasi pencegahan COVID-19. Layanan tersebut telah di-launching pada Selasa (19/5). Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan COVID-19 telah disusun bersama Tim Johns Hopkins Center for Communication Program sebagai *counterpart* dari USAID. Dokumen ini menjadi acuan bagi berbagai pihak terkait dalam memberikan edukasi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat yang mengarah pada pencegahan COVID-19.

Selain itu, layanan (IVR) 321 juga menjadi salah satu pilihan saluran komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk memperoleh informasi tentang COVID-19. Diharapkan, layanan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penyebaran informasi seputar COVID-19 secara lebih merata ke seluruh daerah di Indonesia mengingat layanan ini dapat diakses oleh seluruh pengguna telepon selular di Indonesia. Seluruh konten informasi pada layanan ini pun disediakan dalam Bahasa Indonesia.





## Kementerian Kesehatan Terbitkan Panduan Pencegahan & Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang 'Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi'. Surat keputusan tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut :

### A. Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan Covid-19

**1.**

Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. (Secara berkala dapat diakses di <http://infeksiemerging.kemkes.go.id>. dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).

**2.**

Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, Bagian Kepegawaian, Bagian K3 dan Petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.

**3.**

Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur bagi pekerja untuk melaporkan setiap ada kasus yang dicurigai sebagai COVID-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh Petugas Kesehatan.

**4.**

Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.

**5.**

Pengaturan bekerja dari rumah (work from home).

**6.**

Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.

## B. Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung :

1. Di pintu masuk tempat kerja, lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*, dan sebelum masuk kerja terapkan *Self Assessment* terhadap Risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
2. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang berpotensi mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
3. Untuk pekerja *shift*:
  - a. Jika memungkinkan, tiadakan *shift* ke-3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari)
  - b. Bagi pekerja *shift* ke-3, diatur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.
4. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.
5. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan, pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.
6. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat
  - a) **Higiene dan sanitasi lingkungan kerja**
    - Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
    - Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.

Sumber Foto : Antara Foto

### b) Sarana cuci tangan

- Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).
- Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan.
- Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
- Menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll).

### c) Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja.

Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, dll).

### d) Mengampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut:

- Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)  
Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan / pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.

- Etika batuk

Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.

- Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat.

- Makan makanan dengan gizi seimbang

- Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.

## C. Sosialisasi dan Edukasi Pekerja mengenai COVID-19)

1) **Edukasi** dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.

### 2) Materi edukasi yang dapat diberikan:

- a. Penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya
- b. Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul.
- c. Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar dan etika batuk
- d. Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan
- e. Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan *banner*, pamflet, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio & video yang disiarkan secara berulang. SMS/whatsapp blast ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan.
- f. Materi edukasi dapat diakses pada [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id).

# *New Normal,* Jawa Timur Bersiap Menghadapi Masa Transisi

Meski pergerakan angka kasus positif di Jawa Timur belum menemukan penurunan yang signifikan, Gubernur Jawa Timur sudah menyiapkan beberapa wilayah untuk bisa dijadikan percontohan dalam memasuki masa transisi *New Normal* seperti arahan pemerintah pusat. Salah satu kota pertama di Jawa Timur yang sedang memasuki masa peralihan ini yaitu Kota Malang. Langkah ini diambil setidaknya kurang lebih selama 14 hari ke depan hingga tanggal 14 Juni 2020 sebelum Kota Malang Raya melakukan penerapan *New Normal*.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa pelaksanaan masa transisi *New Normal* ini sebagai bentuk penguatan pendisiplinan dalam pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Sehingga masyarakat tidak menjadikan momentum ini untuk bereuforia seakan PSBB di Malang sudah selesai dan segala aktivitas masyarakat bisa bebas begitu saja.

“

Bagaimana penguatan pendisiplinan dalam pelaksanaan protokol kesehatan ini tetap berjalan. Malang Raya ini yang pertama transisi paska PSBB maka nanti bagaimana masyarakatnya yang lebih produktif sekarang bisa ditingkatkan produktif dan aman





Petugas Dinas Perhubungan melakukan skrining pada pengendara mobil berplat luar kota saat hari terakhir Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di cek poin Graha Kencana, Malang, Jawa Timur, Sabtu (30/5/2020). Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim dan Malang Raya memutuskan untuk tidak memperpanjang masa PSBB yang berakhir pada tanggal 30 Mei 2020 dan melanjutkannya dengan Masa Transisi Normal Baru setelah melihat kurva penyebaran COVID-19 di kawasan tersebut terindikasi melandai dengan jumlah total kasus positif di Kota Malang, Kota Batu dan kabupaten Malang hingga Jumat (29/5) sebanyak 133 kasus. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/hp.



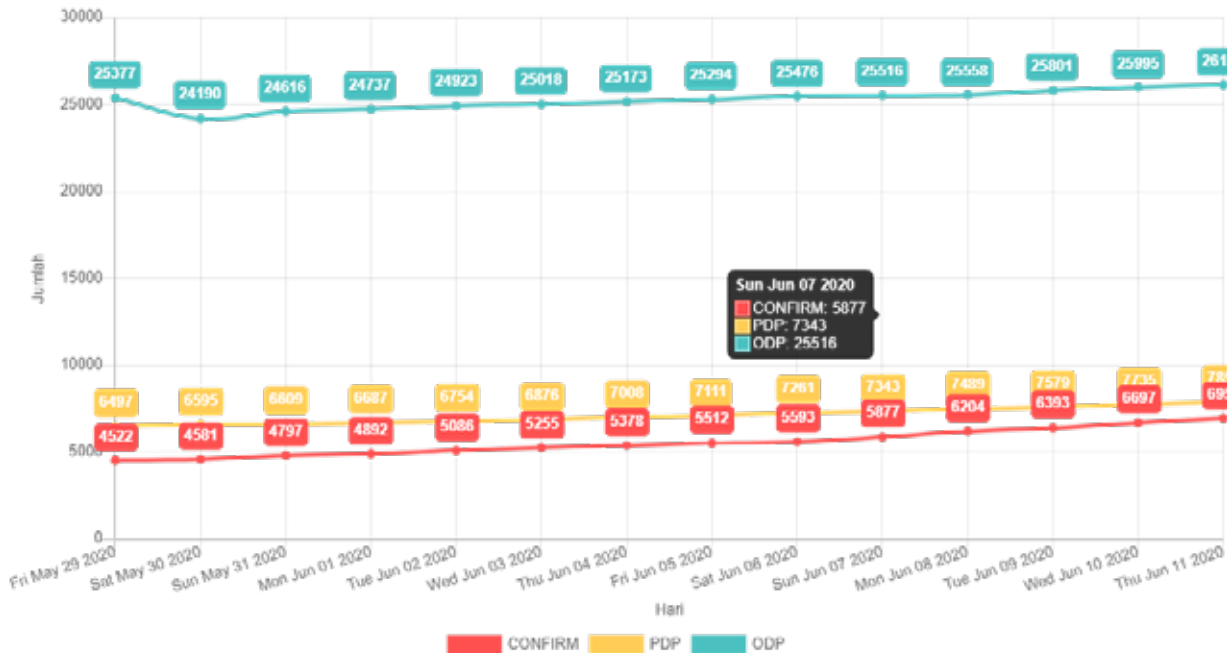
Sumber :  
<http://birohumas.jatimprov.go.id/>

Untuk memaksimalkan proses tersebut, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19. “Untuk mengawal upaya kedisiplinan memakai masker, kedisiplinan menjaga jarak aman dan kedisiplinan untuk mematuhi protokol ini yang harus dijaga oleh semua lapisan,” tambah Khofifah seperti yang dilansir dari portal Info COVID-19 Jatim.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya yang berakhir pada Sabtu (30/05/2020) tidak akan diperpanjang, melainkan dilanjutkan dengan penyiapan transisi menuju New Normal Life di tengah pandemi COVID-19. Salah satu pasar yang menjadi percontohan dalam rangka akan menyiapkan transisi menuju New Normal adalah Pasar Oro-oro Dowo

(OOD) Kota Malang. Pasar yang berlokasi Jalan Guntur, Oro-oro Dowo Kota Malang ini telah menerapkan sistem ganjil genap, menggunakan *face shield* dan masker.

Menurut Gubernur Khofifah, kondisi pasar OOD sangat bersih dan telah disiapkan aturan pola ganjil genap bagi pedagang berdasarkan komoditas dagangannya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Fasilitas



Grafik Perkembangan Persebaran COVID-19 Perhari  
 Sumber : <http://infocovid19.jatimprov.go.id/>

pun disiapkan untuk menunjang persiapan transisi menuju *New Normal*, seperti tempat cuci tangan, *face shield*, masker dan sarung tangan plastik untuk para pedagang.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemetaan dan berencana akan memberlakukan *New Normal* di beberapa kawasan industri di daerah dengan memperbolehkan perusahaan untuk memulai aktivitas kerja. Penerapan tersebut rencananya dilakukan secara bertahap mulai 2 - 8 Juni 2020. Pemberlakuan tersebut harus disesuaikan dengan peta wilayah persebaran COVID-19.

"Saya diperintah untuk membuat peta wilayah industri yang memungkinkan untuk melakukan *New Normal*. Pertama akan kita lakukan percobaan di lima wilayah, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Himawan Estu Bagijo, usai melakukan pertemuan dengan

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (30/05/2020).

Terkait pemetaan *New Normal* bagi industri Jatim di tengah pandemi Covid-19 tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Disnaker di daerah, dan menginstruksikan kepada semua perusahaan yang akan beraktivitas kembali untuk lebih ketat menerapkan protokol kesehatan sebelum pekerjanya masuk.

"Perusahaan selalu terus memperhatikan pekerjanya agar menggunakan APD secara tertib, dan pengawasan secara tertib. Mau pulang juga dilakukan pengawasan protokol kesehatan. Dalam masa *New Normal* tersebut kami kuatir di industrinya ketat, di rumah tidak ketat," tambahnya.

## Strategi Pemulihan Ekonomi ala Jatim: Pertanian

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam paparannya menyampaikan langkah kebijakan pemulihan ekonomi yang diarahkan untuk memperbaiki dua sisi, baik *demand* dan *supply* melalui relaksasi beberapa kebijakan dalam mendorong konsumsi, mendukung dunia usaha dan mempertahankan investasi, serta mendukung ekspor-impor.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah, dalam rilisnya kepada media, Sabtu (30/5/2020) mengatakan, sejak terjadi pandemi COVID-19, komoditas di wilayah Jawa Timur tidak mengalami gejala harga yang signifikan. Bahkan tekanan harga di periode HBKN Idul Fitri 2020 pun relatif normal, tidak setinggi pola historisnya.

Namun, lanjutnya, ada tiga tantangan utama pengendalian inflasi Provinsi Jawa Timur. Pertama, kendala distribusi pangan di tengah penerapan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah. Kedua, penurunan *demand* masyarakat akibat pelemahan daya beli dan dampak psikologis penyebaran COVID-19 yang berpengaruh pada potensi deflasi komoditas yang lebih dalam.

Ketiga, antisipasi dampak perpanjangan penerapan PSBB maupun kondisi *New Normal* pasca COVID-19 terhadap kecukupan stok dan akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak juga turut menyampaikan bahwa sektor pertanian, sebagai salah satu penopang utama perekonomian yang melibatkan setidaknya 1/3 tenaga kerja di Jawa Timur, tidak mengalami guncangan yang besar akibat COVID-19.

Walau demikian, produk turunan sektor pertanian khususnya olahan hortikultura, turut terpukul seiring dengan melemahnya sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. "Maka dari itu, perlu adanya komunikasi efektif, inovasi, dan sinergi antar stakeholders dalam memasarkan produk UMKM pangan Jawa Timur, termasuk potensi kolaborasi dengan Lumbung Pangan Jatim sebagai salah satu jalur pemasaran," tambah Emil.







Sumber Foto :  
Antara Foto



**Menteri Komunikasi dan Informatika  
Johnny G. Plate  
dalam Program Indonesia Bicara TVRI  
Rabu, 27 Mei 2020**

## Infrastruktur Digital

# Menyambut Normal Baru

suksesnya kita mendapatkan produktivitas dan aman dari COVID-19 secara cepat.

Kita tentunya menginginkan masyarakat secara keseluruhan mengambil peran memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan protokol-protokol, khususnya protokol kesehatan, disiplin dan secara terus-menerus menjaga jarak (*physical distancing*). Memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan baik. Kalau itu dilakukan dengan baik maka pekerjaan medis menjadi lebih ringan.

Faktor lainnya adalah populasi masyarakat kita yang begitu besar jumlahnya, apalagi di era yang bebas seperti sekarang cenderung masyarakat hidup dalam kelompok sosial, bergotong-royong dan hidup bersama-sama, bukan masyarakat

**M**enyikapi pandemi COVID-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo secara tegas menyampaikan dua hal penting yang harus dicapai, yakni produktivitas dan aman terhadap COVID-19. Dua sasaran ini menjadi fokus utama pada situasi sekarang ini yang disebut dengan *New Normal*.

Mengapa *New Normal*? Hidup dengan PSBB dan hidup dengan COVID-19 harus ada batasnya. Tidak bisa kita terus melakukan isolasi, mengkarantina diri, dan hanya berpusat pada masalah medis. Kehidupan non-medis juga harus kita lakukan. Ada implikasi yang sama, termasuk media tentunya. Jadi, ada masalah medis, tapi di sisi lainnya juga ada masalah informasi. Dua faktor itu lah yang terpenting, dalam kaitannya dengan *New Normal* dan

# Normal



.....  
 “Memasuki era *New Normal*, tentu syarat melaksanakan aktivitas di luar tempat isolasi dan karantina harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan baik.”

individual. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini justru (dibutuhkan) kehadiran aparat, baik aparat pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta segenap jajaran Polri dan TNI untuk mengambil bagian mendampingi masyarakat. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan tegas, tetapi juga secara halus. Inilah yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Di saat masyarakat memasuki era *New Normal*, maka tentu syarat melaksanakan aktivitas di luar dari tempat-tempat isolasi dan karantina harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan baik.

Di sisi yang lain pemanfaatan ruang digital kita semakin masif dan semakin tinggi. Nah, ini akan sejalan juga dengan peningkatan dari ekonomi digital, karena ada kepatuhan masyarakat menjaga jarak dengan pertemuan fisiknya dikurangi, walaupun tempat-tempat sudah mulai dibuka secara bertahap melalui *New Normal*. Tetapi tetap saja dengan memanfaatkan ruang digital akan lebih memudahkan kita beradaptasi dengan COVID-19.

## *New Normal* dalam Perspektif Kominfo

Terkait dengan era *New Normal* di bidang informatika dan telekomunikasi, kita tahu dampak lain dari COVID-19 adalah percepatan transformasi digital dan *digital society*. Untuk menuju itu, kita harus memastikan bahwa infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi) kita terjaga dengan baik, dan ini dilakukan pada masa kedaruratan COVID-19. Sebagai contoh pada saat Ramadhan dan Idul Fitri yang lalu, ada kenaikan trafik sampai 53%, tetapi infrastrukturnya terjaga dengan baik.

Sebagaimana yang kita ketahui, *New Normal* akan berakhir apabila anti-virus atau vaksinnya sudah ditemukan. Selama belum ditemukannya vaksin, maka *New Normal* akan berjalan terus, sehingga

# Baru

dan teknologi informasi untuk membatasi interaksi juga ikut berperan penting.

Atas dasar itulah Kementerian Kominfo menyusun bagaimana menjaga semua sarana infrastruktur TIK dan fasilitas digital. Termasuk di dalamnya kebutuhan logistik melalui digital, pemesanan barang-barang secara digital yang mengikutsertakan petani, nelayan, peternak, industri rumah tangga atau UMKM dan ultra mikro, untuk berpindah dari pasar-pasar tradisional (*offline*), ke pasar-pasar digital melalui aplikasi dan platform-platform digital sebagai *merchant* (pedagang). Nah, ini tentu akan membantu mendorong keberlangsungan ekonomi digital.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Bapak Presiden sangat memperhatikan secara sungguh-sungguh bagaimana perlindungan dan mengajak UMKM untuk segera bermigrasi, bertransformasi masuk ke digital ekonomi dengan sukses.

## Memastikan Quality of Service

Jika ditanya sejauh mana kesiapan infrastruktur digital kita menghadapi *New Normal*, saya ingin sampaikan bahwa dari sisi *supply* jaringan infrastruktur induk utama *broadband*, baik *fixed broadband* berupa *fiber optic* yang digelar di darat dan di dasar laut terjaga dengan baik. Panjang *fiber optic* kita 348.000 KM, ini panjang sekali. Begitu juga dengan BTS (*Base Transceiver Station*). BTS kita sebanyak 480.000 yang tersebar

di seluruh Indonesia. Kita juga menggunakan *microwave link* di Papua dan sebagian Kalimantan. Tidak saja itu, ada 6 satelit dan tambahan beberapa satelit sewa untuk menjaga jaringan infrastruktur utama *backbone* untuk telekomunikasi dan digital. Itu infrastrukturnya.

Dari sisi infrastruktur terjaga dengan baik, karena apa? Di wilayah-wilayah komersial, operator-operator seluler terus memastikan layanan infrastrukturnya. Sedangkan di wilayah 3T, Badan Layanan Umum Kominfo atau BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) yang membangun infrastruktur TIK atau telekomunikasi juga menjaga dengan baik. Termasuk menyediakan akses internet gratis. BAKTI menyiapkan 7.634 titik lokasi internet gratis di daerah 3T untuk mendukung wilayah-wilayah terluar, terdepan dan tertinggal. Di sisi lainnya, gelar *fiber optic* memang baru sampai di Kabupaten. Ada sebagian kecamatan dan beberapa desa yang sudah, tapi kita masih butuh lebih banyak lagi menggelar tambahan infrastrukturnya.

# Infrastruktur

Dengan memanfaatkan dan menggunakan satelit-satelit komunikasi ini kita harap bisa menghadirkan lebih banyak titik internet, sehingga dari sisi demand (permintaan) dapat memenuhi kebutuhan masyarakat menggunakan internet. Tentu hal ini tidak saja diperuntukan oleh lingkungan usaha tetapi pelayanan pemerintahan, baik pemerintah kecamatan, desa, rumah sakit, Puskesmas serta sekolah-sekolah yang juga membutuhkan internet. Agar pelayanan masyarakatnya berjalan baik, termasuk dalam hal transmisi data.

Kami dari Kementerian Kominfo melakukan monitoring atas *quality of service* tersedianya *bandwidth*. Dari (hasil) monitor, hingga sekarang *bandwidth* yang tersedia masih cukup walaupun ada kenaikan 53%, tapi itu hanya untuk Ramadan dan Idul Fitri. Setelah Ramadhan dan Idul Fitri kembali normal dan terjaga dengan baik, peningkatannya berkisar 10-15% *traffiknya*.

# Quality of Service

Sumber Foto :

Antara Foto | Unsplash

## Akselerasi Pelindungan Data Pribadi

Di samping menyiapkan infrastruktur TIK dan infrastruktur digital, satu hal yang juga tidak lepas dari perhatian kita di era COVID-19 ini adalah pentingnya perlindungan terhadap data. Karenanya Kementerian Kominfo terus menjaga dan memperhatikan agar berbagai aplikasi, startup, platform digital serta semua penyelenggara di ruang digital untuk menjaga datanya dengan baik, memperhatikan peningkatan *technology security* dan SDM (sumber daya manusia) yang berhubungan untuk menjaga keamanan data.

Seperti yang kita lihat, akhir-akhir ini ramai serangan terhadap ruang digital seperti *data breach* dan *data leak*. Tapi dari monitoring yang dilakukan bersama dengan platform digital, startup maupun lembaga-lembaga terkait, data-data yang sangat khusus dan sangat rahasia yang berhubungan dengan financial, kartu kredit, rekening bank, kartu debit terjaga dengan baik. Namun tentu perlu ada penegakan hukum terkait data-data yang disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab, yang tidak memenuhi aturan-aturan dan ketentuan penggunaan dan peruntukannya.

dari sisi r  
atau per  
dibut  
ITE (In  
Elektr  
tetapi k  
Undang  
Data

Pemerintah terus menjamin perlindungan data pribadi dengan melihat dari dua sisi, yaitu dari sisi teknologi dan regulasi. Dari sisi teknologi, seluruh pengguna baik itu PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) atau lembaga-lembaga yang menyimpan dan menggunakan data pribadi harus memastikan keamanan datanya melalui *technology security* dan SDM yang memadai. Sebab, di saat yang bersamaan kita melihat adanya peningkatan teknologi keamanan data dan kemampuan *hacker* yang saling berkejar-kejaran, maka *quality of service* harus selalu ditingkatkan. Sementara dari sisi regulasi, legislasi primer atau perlindungan hukum juga dibutuhkan, tidak saja UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan UU lainnya, tetapi kita juga membutuhkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Terkait dengan UU PDP, proses politiknya sedang berlangsung di DPR RI. Pemerintah sudah menyampaikan Surat Presiden ke DPR RI pada bulan Februari

**Regulasi, legislasi primer  
perlindungan hukum juga  
dibutuhkan, tidak saja UU  
Informasi dan Transaksi  
Elektronik) dan UU lainnya,  
kita juga membutuhkan  
Undang-Undang Pelindungan  
Data Pribadi (UU PDP)**

2020. Kita harapkan proses Rancangan Undang-Undang PDP bersama DPR bisa diselesaikan dengan cepat, mengingat pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo dan DPR RI merasa negara ini membutuhkan payung hukum yang lebih kuat untuk menjaga data pribadi masyarakat, termasuk di dalamnya nanti sanksi dan denda atas pelanggaran-pelanggaran datanya.

## Menyiapkan SDM Digital

Masa darurat pandemi COVID-19 ini memang memaksa kita untuk tidak melakukan kegiatan bertatap muka, sehingga banyak aktivitas yang kemudian bergeser ke ruang digital. Begitu pula dengan program-program pelatihan pengembangan SDM di sektor Komunikasi dan Informatika. Untuk diketahui, setiap Kementerian dan Lembaga tentu punya program pelatihan masing-masing, seperti program pelatihan Kartu PraKerja yang ditangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan program Digital Talent Scholarship oleh Kementerian Kominfo. Tentu dua program ini berbeda sama sekali, begitu juga dengan program-program pelatihan lainnya.

Program pengembangan SDM di Kementerian Kominfo sudah berjalan beberapa tahun yang dilaksanakan secara *offline* dan *online*. Namun karena COVID-19 ini program-program tersebut dilaksanakan semuanya secara online. Sebagai gambaran, Indonesia membutuhkan setidaknya 9 juta digital

talent dalam 15 tahun ke depan, atau rata-rata 600.000 per tahunnya dari berbagai kualifikasi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo bersama ekosistemnya yang bergerak di sektor teknologi telekomunikasi dan teknologi digital secara bersama-sama membangun komitmen untuk menyiapkan SDM yang unggul.

Ada 3 kategori dari sisi Kominfo untuk memberikan stimulus SDM digital.



**Pemanfaatan ruang digital dan teknologi informasi untuk membatasi interaksi juga ikut berperan penting. Kementerian Kominfo memastikan bahwa infrastruktur**

# 1

## **Gerakan Nasional Literasi Digital (Siberkreasi)**

Siberkreasi merupakan sebuah gerakan yang menyentuh langsung dengan masyarakat. Gerakan ini melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk memperkenalkan digital kepada masyarakat yang tingkat partisipasi dan jangkauannya luas, baik masyarakat yang tamatan SD dan SMP, maupun menjangkau masyarakat secara keseluruhan hingga ke pedesaan. Khusus di masa COVID-19 ini, 100.000 gerakan Siberkreasi dilakukan secara online. Setelah COVID-19 berakhir kita akan lakukan lebih banyak lagi.

Siberkreasi memiliki beberapa program. Salah satu di antaranya adalah School of Influencer. Program ini bertujuan untuk mengajak anak-anak bangsa, putra dan putri terbaik kita untuk memproduksi konten-konten kreatif berupa video, gambar, artikel, blog atau vlog yang positif di internet. Tentu tujuan utamanya agar kita bersama-sama memerangi berita bohong, hoaks dan disinformasi yang menyebar di ruang digital kita. Kegiatan ini merupakan inisiasi antara Siberkreasi dan komunitas-komunitas dari berbagai kalangan yang peduli tentang pentingnya literasi digital.

**TIK kita terjaga dengan baik di masa kedaruratan COVID-19**





## 2 Digital Talent Scholarship (DTS)

Program ini ditujukan kepada putra-putri bangsa yang berijazah, baik tamatan sekolah setingkat SMA dan mahasiswa. DTS di tahun 2020 ini dilakukan secara online untuk berbagai macam kurikulum yang berkaitan dengan *Artificial Intelligence, Cloud Computing, Big Data, Machine Learning, Robotic* dan lain-lain yang sudah membutuhkan pengetahuan dan skill yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menyediakan sekitar 30.000 beasiswa yang dilakukan secara online. Di tahun-tahun sebelumnya dilakukan di Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Kominfo, namun saat ini dilakukan secara online di seluruh Indonesia.

Angkatan pertama DTS 2020 sedang berlangsung, sementara untuk angkatan kedua juga berlangsung proses rekrutmen dengan menargetkan sekitar 17.000 calon-calon talenta digital. Kami tentu mendorong para lulusan SMA dan sarjana di seluruh Tanah Air untuk mengambil bagian di dalamnya dan mengikuti program ini secara rutin karena dibiayai oleh negara.

## 3 Digital Leadership Academy (DLA)

Berbeda dengan DTS, Digital Leadership Academy merupakan program bagi para founder startup, Kepala Dinas dari semua daerah untuk mendorong *Smart City* atau Kota Cerdas, serta kepada para dosen untuk membentuk digital master yang akan menjadi pelatih bagi kebutuhan digital talent, yang kualifikasinya relatif lebih tinggi untuk mengisi kebutuhan.

Kementerian Kominfo tentu perannya sebagai stimulus, melihat jumlahnya ini sudah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Kita berharap perusahaan digital teknologi maupun teknologi telekomunikasi seperti Facebook, Google, Microsoft, Amazon dan *technology company* lainnya untuk bersama-sama di Indonesia membuat pelatihan-pelatihan sehingga kita bisa mendapatkan jumlah 600.000 per tahun.

Sebelum COVID-19, kami mengirim Digital Leadership Academy ke beberapa negara termasuk ke berbagai universitas ternama di Tiongkok, Korea, dan Singapura, untuk belajar leadership di bidang digital talent. Inilah tiga program besar yang kami lakukan. Walaupun COVID-19 masih ada, tetapi program-program ini dilakukan secara digital sehingga proses pelatihan ini, terutama Siberkreasi dan Digital Talent Scholarship, berlangsung dengan baik.

# New Normal dan Melawan COVID-19 dengan Disiplin

*New Normal* adalah saat ketika COVID-19 belum ada vaksinya tetapi kita harus berinteraksi sesama masyarakat, produktivitas harus berjalan, pencegahan terhadap penyebaran dan persebaran virus harus bisa kita kendalikan. Nah, suksesnya *New Normal* tergantung pada sikap masyarakat, kalau masyarakat yang melakukan interaksi mengikuti keseluruhan protokol yang disiapkan oleh pemerintah, maka kehidupan *New Normal* akan memberikan hasil yang cepat, di mana virus kita bisa cegah penyebarannya, produktivitas tetap bisa kita tingkatkan.

Tolak ukur untuk menentukan *New Normal* mulai diimplementasikan, misalnya tolak ukur dari WHO yang juga diadopsi oleh Indonesia dibuat dalam satu formula atau alat ukur yang disebut dengan *Reproduction (R0)*.

Ukurannya, apabila tolak ukur dari semua faktor-faktor tersebut  $R_0$ -nya berada di bawah 1, maka bisa kita melakukan kehidupan *New Normal*, di mana ada interaksi yang mengikuti protokol-protokol penanganan. Protokol kesehatan, transportasi, dan semua jenis diikuti tapi masyarakat sudah bisa berinteraksi, bisa kembali bekerja, bisa mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan mematuhi aturan-aturan yang ada.

Untuk mengetahui wilayah mana saja yang  $R_0$ -nya di bawah 1, maka hal pertama yang kita pahami bahwa tidak seluruh wilayah di Indonesia tertular COVID-19. Sebab, ada 110 kabupaten/kota yang tidak tertular baik wilayah di daratan maupun kepulauan. Kemudian, dalam satu Provinsi ada kabupaten/kota yang tertular, tetapi ada juga yang tidak. Oleh sebab itu, seluruh wilayah kemudian dihitung, diukur bagaimana pembukaan per wilayah dengan memenuhi standar WHO yang dihitung dari  $R_0$ -nya.



$R_0$  di bawah 1 diukur dari tren epidemi yang menurun, sehingga (wilayah) yang tren epideminya menurun mulai mempersiapkan. Ketertiban masyarakat melaksanakan protokol dilakukan dengan baik dan aparat juga melakukan pengawalan dengan baik. Tetapi satu hal adalah masing-masing daerah memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga kita harapkan semua daerah secara bersama-sama menjaga daerahnya agar  $R_0$ -nya bisa segera menuju 1 dan di bawah 1, serta mempertahankan agar berada di bawah 1. Maka pembukaan aktivitas dan interaksi masyarakat bisa produktif dan aman dari COVID-19 bisa dilakukan sampai dengan ditemukannya anti-virus atau vaksin.

Berkaitan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan sejauh ini, maka kunci New Normal adalah disiplin. Ketika kita disiplin dan mengikuti aturannya dengan baik, New Normal kita lakukan dan tolak ukur  $R_0$ -nya turun di bawah 1, maka kehidupan kita menjadi lebih aman dan bisa kendalikan COVID-19 itu sendiri. Oleh karena itu, mengendalikan COVID-19 adalah melalui perilaku dan sikap kita, yang di dalamnya termasuk disiplin dan tertib. Dengan begitu Indonesia pasti bisa mengalahkan COVID-19.

Saya meyakini bahwa masyarakat sudah mengetahui protokol-protokol yang sudah diterapkan, terutama protokol kesehatan di mana masyarakat kita disiplin memakai masker, bahkan saat ini hampir semua menggunakan masker.



Yang perlu ditindaklanjuti oleh masyarakat adalah menjalankan kebiasaan lainnya, seperti jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan kebiasaan mengikuti petunjuk-petunjuk lapangan yang dilakukan oleh para petugas, yang sekarang diperkuat oleh TNI dan Polri secara merata di seluruh Indonesia sesuai kebutuhan, untuk daerah-daerah yang tren epideminya menurun. Tapi di wilayah-wilayah yang epideminya masih bertumbuh dan meningkat, maka fokus pemerintah dari sisi medis untuk mengendalikannya dilakukan secara sungguh-sungguh.

Peran pemerintah daerah untuk mengambil bagian secara aktif bersama-sama masyarakat daerah juga akan menentukan. Jika tertib dan disiplin mengikuti protokol maka akan cepat mengendalikan COVID-19. Saya meyakini Indonesia pasti mampu dan bisa mengatasi pandemi ini, karena masyarakat Indonesia dikenal meniru hal-hal yang bagus. Jadikanlah New Normal atau gaya menjaga jarak, gaya menggunakan masker, dan gaya mencuci tangan sebagai bagian dari kehidupan keseharian kita. Di saat (*new normal*) menjadi bagian yang penting dan menjadi kebiasaan kita sehari-hari, maka COVID-19 kita kendalikan.

# AKSI KEMKOMINFO

## *Disinfodemic* Jadi Tantangan Jurnalisme Online Indonesia

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) pada April 2020 lalu mengeluarkan dua *policy briefing* "*Disinfodemic: Deciphering COVID-19 disinformation*" dan "*Disinfodemic: Dissecting responses to COVID-19 disinformation*".

Istilah *disinfodemic* muncul atas situasi masifnya penyebaran informasi yang tidak benar (disinformasi) terkait pandemi Covid-19. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, bahkan menyebut potensi penyebaran disinformasi ini sebagai racun dan musuh umat manusia dalam menghadapi krisis saat ini.

### Sumber Berita :

[https://kominfo.go.id/content/detail/26492/disinfodemic-jadi-tantangan-jurnalisme-online-indonesia/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/26492/disinfodemic-jadi-tantangan-jurnalisme-online-indonesia/0/berita_satker)  
[https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic\\_deciphering\\_covid19\\_disinformation.pdf](https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_deciphering_covid19_disinformation.pdf) [https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic\\_dissecting\\_responses\\_covid19\\_disinformation.pdf](https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_dissecting_responses_covid19_disinformation.pdf)

Sumber Foto : Unsplash

---

“Musuh utama yang patut kita waspadai adalah meningkatnya aliran misinformasi tentang COVID-19. Jurnalis memegang kunci menyediakan informasi yang kredibel, informasi memberdayakan, karena hoaks membahayakan kehidupan, membuat kekacauan dan disharmoni kehidupan masyarakat” papar Menteri Kominfo dalam Webinar “Optimisme Jurnalis di Era COVID-19” dari Jakarta, Kamis (14/05/2020).

Berdasarkan data Tim AIS Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo telah menindak sebanyak lebih dari 1.200 hoaks yang tersebar di platform-platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube.

“Kominfo telah menangani, mendeteksi dan mengidentifikasi sebaran isu hoaks. Data per hari ini menunjukkan 1.471 sebaran isu hoaks ditemukan di empat platform. Sebanyak 1.116 konten masih perlu ditindaklanjuti dan 455 sedang dalam proses,” jelas Menteri Johnny.

Selain paparan terkait penanganan sebaran hoaks, dalam webinar tersebut, Menteri Kominfo turut mengutip laporan dari UNESCO yang menyebutkan bahwa ada 112 juta konten di media sosial secara global yang terkait dengan pandemi Covid-19.

“40% berasal dari sumber yang tidak reliabel, dan hampir 42% dari 178 juta tweet yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 di dunia diproduksi oleh bot yang tak bisa diandalkan,”

ungkapnya. Menteri Johnny menambahkan, terdapat 191 situs di wilayah Eropa dan di Amerika Utara yang mempublikasikan konten bermuatan hoaks, *false information*, *disinformation*, hingga *fake news* terkait COVID-19.

Menteri Kominfo mengungkapkan, saat ini jurnalisme *online* telah menjadi peluang untuk membuka praktik media *online* yang bermasalah dalam mengabarkan situasi pandemi COVID-19. Model bisnis demikian, kata Menteri Johnny, digunakan untuk menangkap dan mempertahankan perhatian pengguna atau user serta pengumpulan data yang digunakan untuk target iklan sehingga menjadikan media *online* mudah disusupi jenis *disinfodemic*. “Target traffic yang tinggi detik per detik seringkali juga mengabaikan persoalan etika,” jelasnya mengkritisi penulisan yang lebih mengutamakan *click-bait* tanpa diiringi fakta sebenarnya.

Menteri Kominfo menyatakan ada empat langkah kesepakatan yang dirumuskan bersama Google, Facebook, Microsoft, Reddit, LinkedIn, Twitter dan YouTube pada 26 Maret yang lalu. “Semua berkomitmen untuk melawan Covid-19 yang berkaitan dengan *disinfodemic*. Melalui langkah *content moderation*, menghapus dan menandai adanya *disinfodemic*, memberi donasi kepada *fact checker* dan jurnalis, mengarahkan user langsung kepada sumber informasi resmi COVID-19 dan melarang iklan COVID-19 yang menyesatkan,” jelasnya. (hm.ys)



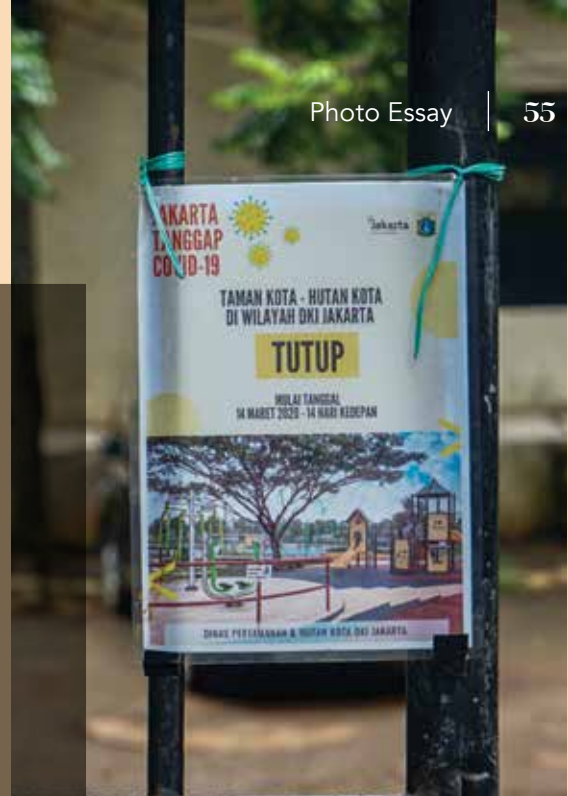
Sejak mewabahnya virus Corona (COVID-19) di Indonesia serta lebih dari satu bulan sudah pemerintah menghimbau *social distancing* dan swakarantina. Diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 bertujuan mencegah penularan COVID-19 makin meluas. Himbauan pemerintah untuk jaga jarak dan termasuk bekerja dari rumah (*work from home*) hingga kewajiban untuk mengenakan masker terutama untuk mereka yang masih harus bepergian keluar rumah.



Sejumlah provinsi dan kabupaten/kota mulai memberlakukan aturan PSBB setelah mengajukan usulan yang kemudian disetujui oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan pertimbangan epidemiologis.

Pelaksanaan PSBB mendapat tantangan serius dari kedisiplinan warga. Walaupun diancam dengan sanksi yang berat, tapi masih terdapat warga yang abai terhadap himbuan *social distancing* serta perusahaan yang masih mewajibkan karyawannya bekerja di kantor seperti biasa.

Keefektifan pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah termasuk Jakarta membuat sejumlah lokasi pusat keramaian yang pada kondisi normal banyak dikunjungi warga dan wisatawan kini terlihat sepi. Tempat ibadah seperti masjid pun meniadakan pelayanan ibadah dalam bentuk apapun termasuk salat tarawih, buka puasa bersama, tadarus, dan itikaf. Hal ini demi kesehatan dan keselamatan warga sehingga diharapkan dapat memutus penyebaran COVID-19 secara efektif.





*Rindu*  
Masa  
Sebelum  
PSBB?

Sumber Foto : Unsplash | Fikri Rasyid



## Lathifa Al Anshori

Tenaga Ahli Menteri  
Komunikasi dan  
Informatika

o p i n i



**Tahukah Anda** kalau kita tidak akan mendapatkan hidup kita kembali sama layaknya sebelum pandemi COVID-19? Baik yang telah sembuh dari penyakit tersebut ataupun yang sehat-sehat saja tanpa Corona. Akan ada perubahan gaya hidup yang signifikan di masyarakat kita. Tanpa ingin berangan-angan terlalu jauh, penulis akan menjabarkan tiga hal yang akan kita rasakan. Pertama, efisiensi penggunaan waktu. Kedua, efek psikologis yang muncul berkat pandemi. Ketiga, terancamnya keamanan negara berkat aktivitas *online*.

Berkat pandemi yang tak kunjung selesai, masyarakat mulai terbiasa dengan penggunaan aplikasi *mobile* yang dapat mendekatkan jarak yang tidak bisa ditemui. Dengan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), keterbiasaan ini menjadi normal baru. Sehingga di masa depan, datang terlambat ke sebuah rapat adalah sesuatu yang bisa dihindari dengan adanya teknologi tersebut. Kalimat "*on the way*" bukanlah lagi sebuah kata yang bisa dimaklumi di dunia kerja berkat manajemen waktu baru yang terbentuk selama PSBB. Jadi bila di bulan-bulan awal banyak yang

kesulitan beradaptasi dengan protokol kesehatan selama pandemi, tantangan baru juga akan dihadapi ketika kembali masuk ke kantor. Adakah di antara Anda yang setiap jam delapan pagi datang ke kantor, lalu tidak tahu mau melakukan apa di kantor? Sementara *timeline* rencana strategis tahunan tidak "mengharuskan" siapapun kerja cepat. Di masa normal baru, ada dua *opportunity* yang bisa diambil dari situasi tersebut, yaitu mempercepat pencapaian target kerja atau melakukan *side hustle* (kerja sampingan). Meski opsi kedua terlihat lebih menggiurkan karena dapat meningkatkan penghasilan, kedua pilihan itu toh akan meningkatkan posisi Anda dalam karir. Jika sebelumnya, diperlukan waktu berjam-jam untuk mencapai sebuah destinasi untuk menggelar rapat, kini itu hanya perlu dilakukan dari meja makan Anda. Pandemi memaksa masyarakat dunia menjadi orang yang super produktif. Tinggal apakah orang Indonesia juga akan mengikuti transformasi tersebut dengan selaras. Menafikan normal baru yang ini hanya akan membuat seseorang, sebuah organisasi, atau pun sebuah perkantoran, menjadi semua tim yang tertinggal kereta cepat.

**Hal kedua yang akan nampak adalah efek psikologis** berkat pandemi. Efek ini berlaku berbeda pada laki-laki dan perempuan. Menurut data yang dihimpun Kementerian Tenaga Kerja dan BP Jamsostek selama 1 April-10 Mei 2020, ada 1.179.697 tenaga kerja laki-laki yang terdampak Covid-19 atau 68% berbanding 32% tenaga kerja perempuan yang terdampak, yaitu 563.207 orang. Meski pemerintah telah menyiapkan program jaring sosial untuk mengatasi masalah yang dapat muncul dari pengangguran, ini tidak menyelesaikan efek psikologis yang timbul dari pemutusan kerja, baik ke terdampak, maupun ke pasangan dan keluarganya. Untungnya pemerintah sudah hadir dengan layanan Sehat Jiwa (Sejiwa), sebuah aplikasi untuk curhat demi menjaga kesehatan mental. Namun, ada pandemi terselubung yang terjadi selama virus Covid 19 ini berkeliaran, yaitu meningkatnya angka Kekerasan dalam Rumah

Tangga (KDRT) di dunia. Menurut United Nations Women, laporan KDRT meningkat sebesar 30% sejak *lockdown* di Perancis dan 25% di Argentina. Di masa sulit seperti ini pun, permintaan untuk rumah perlindungan darurat untuk korban KDRT juga meningkat di Kanada, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Sebuah laporan dari Tiongkok juga menunjukkan meningkatnya jumlah perceraian di negeri tersebut pasca *lockdown*. Aktifitas normal baru rupanya juga membawa hal negatif yang membuat seorang pasangan mengenal pasangan lebih baik. Alas, tidak semuanya berakhir indah. Ini artinya, hal yang sama juga bisa terjadi di Indonesia. Parahnya lagi, perempuan Indonesia cenderung tidak mau melaporkan kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga karena menganggap itu tabu untuk diungkapkan juga memalukan untuk diketahui orang. Padahal, hak asasi setiap insan di dunia ada untuk dihormati.

**S  
E  
J  
I  
W  
A**

Sumber Foto : Unsplash | Daniele



**KDRT**  
**KDRT**  
**KDRT**  
**KDRT**

## Layanan psikologi untuk sehat jiwa.

Membantu penanganan potensi ancaman tekanan psikologi, SEJIWA hadir sebagai layanan konsultasi bagi perempuan dan anak secara gratis.

**Hotline :  
119 ext. 8**



**Yang ketiga, keamanan negara** yang pelan-pelan tergerogoti paham-paham intoleran dari aktivitas *online*. Apakah Anda menyadari bahwa ada peningkatan aktifitas kampanye intoleran dan radikal di dunia maya sejak *physical distancing* digalakkan? Kecenderungan ini bisa dilihat di platform burung biru. Bila sebelumnya ujaran ajakan menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah muncul satu-dua kali dalam sebulan, di masa pandemi ini bisa sekali seminggu. Tagar-tagar yang digunakan jelas-jelas menafikan Pancasila. Mirisnya lagi, masuk ke *trending topic* Indonesia.

Apa yang salah dengan khilafah? Kata "khilafah" itu sendiri tidak salah, tetapi nilai-nilai yang dibawa dalam konsep khilafah kontemporer ini lah yang berlawanan bukan saja dengan ideologi Pancasila, bahkan juga dengan sistem pemerintah demokratis yang diterapkan di masa Khulafaur Rasyidin. Anehnya, kini banyak oknum secara terang-terangan menggunakan kata khilafah dalam kanal medianya. Ini dapat diartikan bahwa tingkat penerimaan

masyarakat terhadap tokoh-tokoh berhaluan intoleran juga meningkat. Jadi, jangan heran jika mayoritas dai yang top di media sosial adalah orang-orang yang punya kecenderungan intoleran, bahkan radikal. Alhasil, dalam normal yang baru, di mana semua orang berusaha bangkit dari ekonomi yang terpuruk dan bisa mengkhawatirkan pemerintah atas segala hal, kita perlu mengkhawatirkan meningkatnya jumlah warga yang menjadi intoleran dan radikal.

Ini tidak bisa dihadapi sendirian. Mengutip Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, sudah saatnya kita kembali merekatkan diri satu sama lain. Masa-masa sebelum PSBB yang kita rindukan, mungkin hanya benar-benar bisa diulang setelah vaksin COVID-19 dihasilkan. Namun, bersama-sama kita bisa membentuk normal baru yang dapat membuat Indonesia lebih maju. Kita harus bersama saling mengingatkan untuk saling terbuka, saling memperluas wawasan, saling menghormati hak asasi manusia, dan bersama membentuk Indonesia yang tetap satu, meski dengan normal baru pasca PSBB.

# Berhitung Berkah Dari *Pandemi*

Sumber Foto : Unsplash | Uray Zulfikar



## FX Bambang Irawan



Dengan tidak menafikan keganasan dan duka yang harus diderita oleh para korban, pandemi Covid-19 ini menghadirkan sisi lain yang positif bagi budaya bangsa ini. Juga peradaban dunia. Dalam waktu sekejap, perilaku masyarakat diubah dengan drastis. Meski ada rasa pilu dan berat, namun sebagian besar masyarakat taat terhadap aturan-aturan baru agar dapat memotong mata rantai penularan sang Corona. Ekonomi juga terdampak, namun masyarakat juga dengan bijak menomorduakan dulu urusan ini dan mengedepankan pertimbangan kesehatan.

Tentu saja, ada juga beberapa oknum masyarakat yang berpikiran beda atau terdesak situasi sehingga mengabaikan protokol kesehatan, mengesampingkan kepentingan bersama. Namun secara umum dapat dikatakan masyarakat kita bergotong royong dengan baik untuk mengatasi krisis ini.

Di antara saat-saat krisis yang memaksa orang tinggal di rumah dan membatasi kegiatan ini, muncul kebiasaan dan budaya baru dalam berinteraksi sosial dan fisik. Muncul pula kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang kontemplatif. Tak kurang juga motivasi-motivasi inspiratif yang muncul dalam bentuk status-status di media sosial atau meme. Berikut ini kita pilih saja beberapa catatan tentang ketangguhan masyarakat kita menghadapi krisis yang kadang mengundang senyum, memompa motivasi, dan menimbulkan harapan.

### Empon-empon.

Pada masa-masa awal pandemi, harga tanaman obat atau rimpang ini melonjak di pasar-pasar karena dianggap bagus untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh. Penanam dan pedagang menanggung untung besar. Budaya kembali kepada tanaman herbal untuk kesehatan tumbuh lagi.

### Gunung Salak.

Begitu ditetapkan anjuran untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, aktivitas industri dan transportasi yang merupakan penyumbang utama polusi menurun drastis. Tiba-tiba warga Jakarta bisa melihat Gunung Salak di Bogor dengan jelas, tidak terhalang kabut polusi. Seluruh belahan bumi juga melaporkan perbaikan kualitas udara.



### Sepeda.

Ada sebuah laporan yang mengungkapkan bahwa selain belanja item kesehatan, belanja sepeda juga meningkat drastis. Orang butuh mengisi kegiatan sekaligus berolahraga di sekitar rumah, dan sepeda merupakan salah satu jawaban yang paling tepat.

### Resep masakan.

Salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat selama masa tinggal di rumah saja adalah mencoba segala macam resep masakan. Selain karena waktu luang, ini juga karena kesempatan jajan di luar sangat terbatas, padahal godaan untuk makan di masa ini muncul dengan kuat.

### Keterampilan baru.

Ada sebuah meme motivasional yang muncul: Jika Anda tidak menambah keterampilan baru dalam masa pandemi ini, sesungguhnya Anda adalah golongan orang yang memang suka menyia-nyiakan waktu. Ungkapan ini benar belaka, karena tersedia banyak waktu longgar bagi kita semua yang bisa dimanfaatkan untuk belajar sesuatu yang baru atau mengasah keterampilan lama.

### Tangan mulus.

Banyak orang bercanda bahwa hanya dalam masa pandemi ini tangan kita bertemu sabun atau pembunuh kuman setiap saat sampai-sampai tangan jadi terasa halus. Atau bahkan malah kesat cenderung kering.

### Rambut gondrong.

Salah satu hal yang sulit dilakukan pada masa ini adalah bercukur rambut. Maka banyak yang berinisiatif membuat tutorial mencukur rambut sendiri. Namun banyak juga yang memilih untuk tetap memanjangkan rambutnya sampai nanti keadaan cukup kondusif.

### Salam Corona.

Ada banyak gaya untuk mengganti salaman yang bersentuhan telapak tangan dengan model salam lainnya. Yang paling populer adalah menangkupkan kedua tangan di dada atau yang lebih gaul dengan mempertemukan siku dengan siku.

### Ortu jadi guru.

Awalnya mungkin para orang tua bersyukur bahwa mereka bisa ikut mendampingi belajar anak-anaknya. Namun banyak yang kemudian secara bercanda mengakui bahwa ternyata tugas seorang guru itu berat dan menantang kesabaran. Umumnya ini terjadi setelah mereka hilang kesabaran terhadap anak-anaknya dalam mengerjakan soal atau tugas.

### Masker kain.

Pada masa awal, terjadi kelangkaan stok masker dan *hand sanitizer*. Ini dipicu dan memicu orang untuk menimbun dan menjualnya dengan harga selangit. Untunglah semua elemen masyarakat bergerak untuk berinisiatif menjahit sendiri masker, baik dengan bahan standar maupun dengan bahan medis, bahkan kain biasa. Ujungnya, terjadi surplus masker, hampir di setiap ruas jalan ada penjaja dagangan ini. Penimbun gigit jari.

### Menahan bersin.

Dulu orang bersin sembarangan sudah biasa. Sekarang, orang bersin dipelototi orang. Ada lelucon bahwa sekarang orang lebih takut bersin daripada kentut sembarangan. Orang juga sadar bahwa kalau tidak bisa ditahan, ada cara bersin yang baik, yaitu dengan menutup dengan lengan.

### Boom Zoom.

Aplikasi paling favorit untuk mengelat rapat atau pertemuan virtual di Indonesia, dan juga dunia, adalah Zoom. Maka terjadi lonjakan pengguna yang luar biasa pada layanan ini. Memang peranti ini cara penggunaannya sederhana dan mampu menghimpun banyak peserta sekaligus. Wajar jika terjadi booming penggunaan Zoom. Jika dulu orang ber-wefie-ria setelah selesainya acara, kini orang men-*screen capture* layar Zoom untuk dipajang di medsos.

### Berjemur.

"Jam berapa berjemur paling efektif untuk mendapatkan vitamin D yang bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh?" adalah salah satu isu yang hangat "diperdebatkan" di dunia maya. Ini menunjukkan bahwa orang sangat peduli dengan kesehatan pribadi sampai ke hal-hal yang detail.

### Vitamin C.

Selain empon-empon, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C merupakan item yang harus ada dalam *list* timbunan belanjaan: jeruk, jambu biji, nanas, dan lain-lain. Namun vitamin C dalam bentuk suplemen juga sangat diburu. Dan ini sempat melambungkan merek tertentu.

### Rajin beribadah.

Rasa haru menyergap umat ketika mereka harus menggelar ibadah di rumah. Membuat mereka sadar sering menyia-siakan kesempatan mendatangi tempat ibadah ketika diberi kelonggaran, dulu. Namun, dengan krisis yang mengancam jiwa, juga mungkin karena lebih fleksibel beribadah di rumah, tak sedikit yang justru makin rajin beribadah di rumah.

### Rasional.

Pandemi ini bertepatan dengan ibadah puasa dan hari raya Idulfitri bagi umat muslim. Ritual dan tradisi hari raya ini yang sangat kental dengan nuansa silaturahmi tentu sangat berat untuk ditinggalkan. Namun masyarakat bisa mengedepankan rasionalitas dibanding perasaan sentimental. Masyarakat mampu menahan diri sekaligus mensosialisasikan protokol kesehatan yang benar dengan membatasi ritual seperti mudik.

### Digitalisasi.

Mungkin berkah ini yang paling menonjol dan sangat positif. Dengan keharusan untuk *sosial distancing*, maka ketergantungan masyarakat kepada teknologi digital yang makin tinggi adalah sebuah *blessing in disguise*. Belanja melalui daring, fintech, dan *meeting* secara virtual menjadi makanan sehari-hari. Ekonomi digital diharapkan akan membengkok mengikuti drastisnya hijrah masyarakat ke digitalisasi ini.

# Komunikasi Teraupetik & Narasi Tunggal

## Menyoal Prediksi Akhir Pandemi

Sumber Foto : Unsplash | Tam Wai





## | Ahmad Irso Kubangun

Selama masa pandemi COVID-19, kita dikenalkan dengan banyak sekali istilah dan jenis-jenis protokol penanganan pandemi ini. Ada istilah Social Distancing atau pembatasan sosial, *work from home (WFH)*, isolasi atau karantina, *lockdown*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), hingga *New Normal* atau kenormalan baru. Dari sisi pencegahan potensi penularan, kita juga sering mendengar PDP (Pasien Dalam Pengawasan), ODP (Orang Dalam Pemantauan), OTG (Orang Tanpa Gejala), *Herd Immunity* dan masih banyak lagi istilah medis dan non-medis yang sering digunakan untuk membantu masyarakat mengetahui potensi penularan untuk melawan pandemi COVID-19. Dalam kondisi darurat saat ini juga, pemerintah sudah menyiapkan berbagai jenis protokol menjadi konsumsi kedisiplinan sehari-hari; ada protokol kesehatan, protokol area publik dan transportasi, protokol komunikasi, protokol area institusi pendidikan, dan protokol pengawasan perbatasan.

Semua istilah dan jenis protokol ini tanpa disadari telah menghantarkan kita pada beberapa fase pandemi yang sudah berlangsung lebih dari tiga bulan, sejak pertama kali Indonesia terkonfirmasi kasus positif di awal Maret

lalu. Fase demi fase itu telah kita lewati tentunya dengan segala upaya, kerja keras, solidaritas, prinsip membangun semangat gotong royong, maupun narasi optimisme agar Indonesia bangkit melawan wabah virus Corona. Prinsip bersatu lawan COVID-19 tidak saja kita jumpai di Indonesia, tapi seluruh belahan dunia khususnya 216 negara atau kawasan yang terkonfirmasi diserang wabah.

Oleh karena itu, semangat bangkit melawan COVID-19 tidak saja datang dari masyarakat maupun dari pemerintah semata. Banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai elemen ikut menyalurkan kontribusinya. Dari aspek pendidikan dan penelitian misalnya, sudah sering kita mendengar lembaga-lembaga riset nasional bahkan internasional, masing-masing memperkirakan kapan berakhirnya Pandemi COVID-19. Secara keseluruhan dapat ditarik benang merah bahwa dunia kembali normal setidaknya akhir tahun 2020 nanti.

Berbagai perkiraan itu dimunculkan saat masyarakat mempertanyakan kapan pandemi ini berakhir? Namun di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya mengumumkan bahwa ada kemungkinan virus Corona

tidak akan hilang meskipun pandeminya berakhir. Meski demikian, Indonesia jangan sampai patah arang. Jika kita bersatu, wabah ini pasti akan berakhir. Baik prediksi ahli maupun WHO, jawaban yang tepat melawan pandemi ini adalah diri kita sendiri, masyarakat secara kolektif di mana diharuskan untuk mematuhi protokol-protokol yang kemudian sudah diterapkan. Memang, satu-satunya cara adalah ketika dunia telah menemukan vaksin. Namun, hingga saat ini masih belum ada titik terang kapan vaksin atau obat itu ditemukan. Vaksin yang benar-benar ada di hadapan kita adalah diri kita sendiri. Ya, ketika masyarakat patuh terhadap

protokol maka vaksin untuk menyembuhkan dunia adalah manusia itu sendiri.

Maka dari itu, sebelum menyoal prediksi para ahli, alangkah baiknya ketika dalam situasi seperti saat ini kita menggunakan pendekatan komunikasi sebagai salah satu langkah utama pencegahan. Sebab, dengan komunikasi yang terarah dan terukur, masyarakat akan semakin mudah memahami dan menerima kondisi pandemi, begitu juga dengan pilihan hidup berdamai di tengah wabah.

Kenapa harus komunikasi? Karena penanganan secara medis maupun non-medis sangatlah berdampak pada

sejauh mana narasi dan informasi itu diarahkan untuk upaya pencegahan. Jika konsep komunikasi tidak diatur dengan baik, justru kesimpangsiuran informasi semakin rumit. Oleh karena itu, secara teoritik kita melihat persoalan ini dalam aspek komunikasi teraupetik perspektif kesehatan dan komunikasi tunggal atau narasi tunggal.

## Teraupetik dan Narasi Tunggal

Secara umum, komunikasi teraupetik diartikan sebagai bentuk komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya berpusat pada bagaimana upaya dan usaha kesembuhan serta membina hubungan emosional secara teraupetik antara perawat dan klien atau dalam hal ini pasien. Istilah teraupetik sendiri memang terdengar asing ketika membicarakan COVID-19. Namun, berkaitan dengan itu sebenarnya pendekatan komunikasi teraupetik diperlukan untuk memberikan dorongan kepada pasien yang berjuang melawan virus dalam dirinya. seorang pasien yang telah melalui rintangan melawan wabah tersebut juga akan menjadi stimulus bagi masyarakat lainnya agar patuh dan taat. Sehingga konsep teraupetik dalam situasi ini juga penting untuk diketahui.

Sumber Foto : Antara Foto

Untuk memahami pendekatan teraupetik maka sebagai contoh dari aspek Public Relations (PR) yang bertujuan membangun image positif di mata klien, seorang praktisi harus memiliki standar brand dan cara membangun citra klien yang baik di hadapan khalayak umum atau target audience-nya. Pada saat klien, baik klien secara personal maupun dalam sebuah perusahaan/lembaga tertentu mengalami masalah personal yang bisa memperburuk citranya, maka seorang praktisi dihadirkan untuk mengembalikan citra kliennya. Sama halnya dengan pendekatan teraupetik, seorang perawat juga bisa kita sebut sebagai seorang praktisi dalam ilmu kesehatan. Tugas perawat adalah meyakinkan kliennya (pasien) untuk melewati tahap demi tahap penyembuhan.

Menurut Hamid (1999), tujuan teraupetik akan tercapai bila perawat memiliki karakteristik seperti misalnya, timbul kesadaran diri, klarifikasi nilai, eksplorasi perasaan, kemampuan untuk menjadi model peran, motivasi altruistik serta rasa tanggungjawab dan etik. Ketika kembali menyoal pandemi COVID-19, kita tentu menyadari bagaimana peran penting petugas medis baik dokter, perawat dan seluruh ekosistemnya yang terlibat menjadi garda terdepan menyelamatkan bangsa ini dari penularan wabah.

Kita sadari bersama bahwa petugas medis telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Perjuangan mereka dalam menyelamatkan nyawa dari COVID-19 patut diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Artinya, mereka telah menyampaikan pesan komunikasi teraupetik yang baik agar kita semua patuh menjalankan protokol kesehatan. Dalam hal ini, kita sepakat bahwa petugas medis

adalah PR-nya kesehatan kita, juga sebagai praktisi yang hebat yang selalu mengingatkan kita selaku kliennya pada aturan dan kebijakan yang sudah ditentukan untuk meminimalisir bahkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Pendekatan komunikasi teraupetik juga sebenarnya sejalan dengan narasi tunggal yang selama ini menjadi satu pintu komunikasi seputar COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Terapeutik telah kita pahami sebagai upaya penanganan dari sisi medis yang bermuara pada pola komunikasi yang dibangun oleh petugas medis. Maka, narasi tunggal mencakup keseluruhan informasi COVID-19 dengan tujuan tidak adanya tumpang tindih dan biasanya informasi.



Mengutip pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang menyebutkan bahwa, narasi tunggal menjadi salah satu upaya lain untuk mencegah semakin banyaknya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, narasi tunggal secara hirarkis berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk mentransmisikan narasi yang semua seputar COVID-19.

Lebih lanjut lagi, ketika narasi tunggal ini dilakukan dengan baik, tidak saling adanya bias informasi, maka pemerintah pusat maupun daerah difokuskan pada penanganan medis. Inilah kuncinya, membangun pendekatan teraupetik dan narasi tunggal merupakan bagian dari pola komunikasi antara aspek medis dan non medis. Ketika semua ekosistem menerapkannya, akan sedikit membantu dunia menjawab kapan pandemi ini berakhir. Sebab, berakhir atau tidaknya pandemi COVID-19 ada pada diri masyarakat itu sendiri jika mematuhi semua prosedur yang kemudian berlaku.



## Bangkit dalam Optimisme Normal Baru

Peringatan ke-112 Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2020 berlangsung secara virtual. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan peringatan yang berlangsung dalam situasi pandemi COVID-19 akan menjadi momentum bagi seluruh bangsa Indonesia untuk bangkit dalam optimisme normal baru. Oleh karena itu, Menteri Johnny berharap agar kebangkitan nasional tidak sekadar diperingati sebagai ritual belaka.

“Dalam setiap peringatan tentunya mengandung nilai-nilai afektif dan edukatif yang dapat dijadikan teladan untuk generasi masa kini dan yang akan datang,” ungkapnya saat menjadi Inspektur Upacara Bendera Peringatan ke-



112 Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2020 di Lapangan Anantakupa Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (20/05/2020).

Upacara yang berlangsung dengan menerapkan *physical distancing* itu dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I) dan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Kementerian Kominfo. Sementara, seluruh sivitas Kementerian Kominfo mengikuti upacara melalui konferensi video dari rumah masing-masing. Prosesi upacara juga disiarkan langsung melalui TVRI dan kanal media sosial Kementerian Kominfo.



“**Kiranya benang merah antara ibadah puasa dan Lebaran ini juga sesuai dengan semangat kita melawan COVID-19 ini, yaitu laku menahan diri, menempa raga, membersihkan diri, dan pada akhirnya mencapai kemenangan.**”

Peringatan kebangkitan nasional setiap tahun, menurut Menteri Kominfo, menjadi titik awal membangun kesadaran bergerak bersama mengatasi permasalahan bangsa Indonesia.

“Semangat Kebangkitan Nasional perlu ditanamkan dalam jati diri setiap warga negara Indonesia. Tujuannya dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai bentuk ancaman serta memperbaiki kehidupan bangsa yang lebih baik kedepannya,” ujar Menteri Johnny.



Dengan semangat kebangkitan nasional, Menteri Johnny mengajak seluruh bangsa bergerak untuk menghadapi COVID-19. Targetnya agar masyarakat tidak terpapar sekaligus tidak terkapar karena dampak ekonomi dan sosial pandemi COVID-19.

“Pertama, memastikan agar protokol kesehatan dijalankan dengan menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan menggunakan masker. Kedua, menjaga agar kepentingan rakyat secara khusus aspek perekonomian dan lapangan kerja tetap terjaga. Dan, ketiga sebagai bangsa, kita semua dipanggil untuk berkolaborasi dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” jelasnya merinci langkah yang bisa dilakukan setiap orang.

Menurut Menteri Johnny, pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan untuk mencegah penularan sekaligus memastikan agar kehidupan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

“Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa kedua pendekatan ini, ekonomi dan kesehatan, ditempuh sekaligus dalam takaran prioritas yang disesuaikan dengan data empiris dan kondisi Indonesia,” jelas Menteri Kominfo.

Secara umum, Menteri Kominfo menyatakan tiga inti kebijakan pemerintah yang sangat jelas dan tegas dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. “Pertama, menempatkan kesehatan masyarakat sebagai yang utama. Ini ditempuh dengan cara mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mengobati pasien yang terpapar,” urainya. Kebijakan kedua, menurut Menteri Johnny, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.

“Ketiga, menjaga dunia usaha utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah (UMKM) agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya.

---

**Sumber :**

[https://kominfo.go.id/content/detail/26605/siaran-pers-no-70hmkominfo052020-tentang-bangkit-dalam-optimisme-normal-baru/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/26605/siaran-pers-no-70hmkominfo052020-tentang-bangkit-dalam-optimisme-normal-baru/0/siaran_pers)



## Optimisme Normal Baru

Sebagai tema pokok peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020, Menteri Johnny mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk membiasakan diri dengan cara hidup baru dan tetap produktif.

“Saat ini bangsa sedang memanggil kita untuk bersatu padu untuk Bangkit dalam Optimisme Normal Baru. Kita harus membiasakan diri dengan cara hidup baru. Tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Terbiasa menerapkan protokol kesehatan, protokol transportasi dan protokol lainnya. Meskipun ada perubahan standar dalam mekanisme kerja, belajar maupun aktivitas lainnya,” ajaknya.

Menteri Kominfo menyatakan salah satu makna Kebangkitan Nasional yang diperingati di saat umat muslim sedang menunaikan ibadah suci Ramadan dan menjelang Idulfitri 1441 Hijriyah adalah dapat mencapai kemenangan.



"Kiranya benang merah antara ibadah puasa dan Lebaran ini juga sesuai dengan semangat kita melawan COVID-19 ini, yaitu laku menahan diri, menempa raga, membersihkan diri, dan pada akhirnya mencapai kemenangan," ungkapnya.

Menteri Johnny juga menilai kebangkitan nasional dalam masa pandemi COVID-19 harus dimaknai sebagai dorongan percepatan memasuki era digital.

"Mari kita manfaatkan ruang digital secara tepat dan bijak. Katakan tidak pada segala jenis hoaks, ujaran kebencian dan berbagai jenis penyalahgunaan ruang digital yang mencederai semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Selalu isi dengan hal bermanfaat untuk kemajuan ekonomi, secara khusus ekonomi digital yang berkembang dari waktu ke waktu," ajaknya.





Di akhir pidato, Menteri Kominfo mengajak setiap elemen bangsa memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2020 dengan optimisme untuk menjadi pemenang dan memulihkan kondisi sosial ekonomi.

"Saya ucapkan selamat memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2020. Kita optimistis akan keluar sebagai bangsa pemenang. Menang dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19-19, sekaligus menang dalam memulihkan kondisi sosial-ekonomi," pungkasnya.



## Ketika Semua Harus Memulai Fase “New Normal” Hadapi COVID-19

**Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito (kiri) dan Tim Pakar Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Dr. Beta Yulianita Gitaharie. (Humas BNPB/M Arfari Dwiatmodjo)**

JAKARTA - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia bahkan dunia hingga saat ini belum dapat menjawab pertanyaan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir.

Meski hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mengobati COVID-19, beberapa ahli dan pakar dunia tengah berlomba untuk menemukan ramuan yang tepat untuk mengobati virus SARS-CoV-2 yang utamanya menyerang paru-paru manusia tersebut.

“Seluruh dunia juga tidak tahu, karena virus ini, untuk vaksinnya belum ditemukan. Jadi, maka dari itu, sampai dengan vaksin belum ditemukan, kita harus bisa selalu berhadapan dengan virus ini,” ungkap Wiku dalam dialog di Media Center Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta (12/5/2020).

Dalam hal ini perlu dipahami bersama dan disadari secara kolektif bahwa dalam masa krisis kesehatan seperti yang sedang dialami Indonesia dan beberapa negara di dunia, penerapan protokol kesehatan menjadi metode paling dianjurkan untuk menghadapi COVID-19.

Protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak dan beraktivitas di rumah menjadi hal yang wajib dilakukan demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Selain itu, beberapa kebijakan telah diambil oleh berbagai negara di dunia seperti penerapan *lockdown*, karantina wilayah, dan pembatasan wilayah.

Pemerintah Indonesia pun telah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang hingga saat ini masih diterapkan hingga waktu yang belum ditentukan. Penerapan PSBB tersebut berlaku bagi seluruh kalangan namun ada pengecualian.

Dalam peraturan PSBB telah disebutkan bahwa mereka yang 'direstui' keluar batas wilayah tertentu adalah bagi yang mengantongi surat izin dinas dari atasan. Selain itu juga bagi mereka yang sedang ditimpa kemalangan, pun harus menyertakan beberapa dokumen yang disyaratkan.

Keadaan seperti itu menunjukkan bahwa pada akhirnya masyarakat Indonesia harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru. Ada beberapa hal baru yang harus ditegakkan di tengah rutinitas yang selama ini dikerjakan.

Perlu dipahami bahwa tidak semua aktivitas dilarang, namun dikurangi atau diganti penerapannya. Tidak ada sekolah di ruang kelas, namun diganti belajar di rumah. Tidak ada bekerja di kantor, namun bekerja dari rumah.

Pelaksanaan ibadah pun terkena imbas. Upacara keagamaan dan ibadah yang lainnya harus dilakukan di rumah. Tidak ada kerumunan, karena hal itu sangat berpotensi terjadi penularan COVID-19.

Beberapa bentuk perubahan atau transformasi baru inilah yang kemudian melahirkan istilah "New Normal", yakni perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan virus corona jenis baru, penyebab COVID-19.

"Prinsip yang utama adalah harus bisa menyesuaikan pola hidup. Secara sosial, kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk, new normal, atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan, dan bekerja, dan

sekolah dari rumah," jelas Wiku.

Secara sosial disadari bahwa hal ini juga akan berpengaruh. Sebab ada aturan dalam protokol kesehatan untuk menjaga jarak sosial dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain.

Lantas sampai kapan masyarakat harus hidup secara "New Normal" ini?

Profesor Wiku menjelaskan bahwa kehidupan dapat kembali normal setelah vaksin ditemukan dan dapat dipakai sebagai penangkal virus corona jenis baru itu. "Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini," kata Wiku.

Menurut Wiku, beberapa ahli dan pakar dunia telah memastikan bahwa kemungkinan paling cepat ditemukan vaksin itu adalah tahun depan. Artinya kemungkinan terbesar masyarakat harus hidup secara "New Normal" sampai tahun depan, bahkan bisa lebih.

Dalam hal ini, pemerintah pastinya berharap agar vaksin itu tidak sampai harus dikonsumsi untuk mengobati COVID-19 yang dijangkit oleh masyarakat Indonesia.

Dengan kata lain, pemerintah berharap bahwa penularan virus corona jenis baru di tengah masyarakat itu dapat diputus sebelum vaksin itu ditemukan.

Oleh sebab itu, perubahan perilaku menjadi kunci optimisme dalam menghadapi COVID-19 ini. Yakni tetap menjalankan kehidupan sehari-hari ditambah dengan penerapan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga berharap bahwa sebelum vaksin di temukan, masyarakat dapat kembali hidup "normal" setelah menerapkan "New normal" dengan disiplin tinggi dan bergotong-royong agar terbebas dari COVID-19.

"Tapi, kita harus berpikiran positif, karena Indonesia ini punya kapasitas yang besar dan gotong royong, nah, marilah kita gotong royong untuk merubah perilaku bersama," jelas Wiku.

# Portal BLC Pantau dan Sajikan Data Sebaran COVID-19

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional meluncurkan portal integrasi data Bersatu Lawan COVID (BLC), yang menyajikan informasi secara transparan dan terbuka penanganan COVID-19 di Indonesia. Masyarakat dapat mengakses sistem tersebut melalui laman [covid19.go.id](https://covid19.go.id).

Ketua Gugus Tugas Nasional, Doni Monardo, mengatakan bahwa sistem ini mampu mencatat dan mengintegrasikan data COVID-19. Data tersebut berasal dari input data di tingkat puskesmas, rumah sakit, laboratorium pemeriksa, dan dinas kesehatan di tingkat daerah dengan pendampingan dari TNI, Polri, BPBD, BIN dan jajaran dinas kominformasi di daerah.

“Sistem Bersatu Lawan COVID merupakan hasil upaya kolaborasi lintas sektor yang dikoordinasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19. Sistem ini tercipta atas kerja sama antara Tim Pakar Gugus Tugas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Komisi Informasi Pusat,” ujar Doni saat peluncuran BLC di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, pada Rabu (29/04/2020).

Doni yang juga merupakan Kepala BNPB menambahkan bahwa sistem ini mampu memantau data sebaran kasus positif, pasien positif yang sembuh dan meninggal, orang dalam pemantauan (ODP), serta pasien dalam pengawasan (PDP).

“Selain itu, sistem dapat melihat gambaran kasus secara detail serta dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan logistik RS dan laboratorium dalam penanganan COVID-19, untuk dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan ke depannya,” tambahnya.

Portal BLC menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di tengah krisis COVID-19. Masyarakat dapat memantau peta sebaran kasus positif COVID-19 secara nasional maupun per provinsi. Sebaran kasus tersebut dapat dilihat berdasarkan waktu sehingga masyarakat dapat melihat juga riwayat sebaran kasus mulai dari awal hingga kini.

Selain itu, BLC menampilkan beberapa jenis grafik. Grafik yang ditampilkan antara lain kasus kumulatif nasional dan setiap provinsi. Grafik ini memperlihatkan grafik kasus meninggal dunia, sembuh dan perawatan harian secara



nasional. Selanjutnya, masyarakat dapat melihat grafik kasus berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, serta kasus berdasarkan gejala awal dan komorbid atau kondisi penyerta yang paling banyak diderita pasien COVID-19.

BLC juga memiliki aplikasi yang dapat terpasang pada telepon pintar dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasinya pada Playstore dan Appstore. Pada aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui pemantauan kasus di wilayahnya, pemantauan lokasi rawan hingga tingkat kecamatan, diagnosa mandiri, pemantauan isolasi dan telekonsultasi.

“Aplikasi ini dapat digunakan untuk masyarakat dan petugas kesehatan sehingga dapat



menekan pohon penyebaran COVID-19 dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia,” ujar Doni.

## Dua Fungsi Utama

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan portal hasil hasil kerja bersama Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, BNPB, Komisi Informasi Pusat, serta K/L terkait lainnya memiliki dua fungsi utama. “Pertama, fungsi integrasi dan konsolidasi data kesehatan, kependudukan, dan logistik, dan data-data lainnya yang dihimpun dari 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, serta kementerian lembaga terkait,

maupun platform digital,” ujarnya.

Menteri Johnny menegaskan bahwa data yang terintegrasi sangat penting sebagai basis pengambilan kebijakan secara akurat, terukur, dan efektif.

Sementara fungsi kedua, Menteri Kominfo menjelaskan bahwa sistem itu juga dapat diakses publik melalui portal covid19.go.id. Portal resmi Gugus Tugas COVID-19 tersebut telah dikembangkan agar data-data yang terintegrasi dapat diakses oleh publik dengan visualisasi yang lebih detail.

“Selain itu, platform juga memiliki fitur-fitur seperti dashboard pengelolaan data, pelaporan mandiri, chatbot,

penanganan hoaks, informasi telemedicine dan rumah sakit rujukan, data lengkap protokol dan regulasi, serta banyak fitur lainnya,” jelas Menteri Johnny.

Menteri Kominfo menambahkan portal “Bersatu Lawan COVID-19” akan dilengkapi dengan fitur SEHATJIWA, sebuah layanan psikologi selama Pandemi COVID-19. Sistem integrasi data itu, menurut Menteri Johnny melengkapi inisiatif Kementerian Kominfo sebelumnya melalui Aplikasi PeduliLindungi.

“Aplikasi PeduliLindungi telah diunduh oleh 2.967.408 orang. Aplikasi ini terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan penyebaran COVID-19,” tutur Menteri Johnny.

Menteri Johnny mengharapkan partisipasi aktif dari pengelola data COVID-19 baik di pusat maupun daerah untuk dapat memanfaatkan sistem integrasi data nasional “Bersatu Lawan COVID-19”. “Dengan partisipasi aktif seluruh komponen terkait, saya yakin bahwa integrasi dan keterbukaan data ini akan membawa manfaat signifikan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” ungkapnya.



## Analisa Data Terintegrasi Landasan Pemulihan Aktivitas Masyarakat

Sistem informasi terintegrasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) menjadi dasar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk menganalisa data yang kemudian dijadikan sebagai landasan pemulihan Aktivitas Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19.

Pakar Informatika Penyakit Menular dan Epidemiologi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan, sistem BLC telah mencatat sebanyak 39.000 data penyelidikan epidemiologi hingga Sabtu (30/5).

"Sampai dengan hari ini, sistem Bersatu Lawan COVID telah mencatat sebanyak 39.000 data penyelidikan epidemiologi," ungkap Dewi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5).

Data penyelidikan tersebut berasal dari Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien positif, kontak erat pelaku perjalanan yang di dapatkan dari

Puskesmas, Rumah Sakit (RS) dan Dinas Kesehatan. Selain itu data dari sistem tersebut juga diintegrasikan dengan RS Online di bawah koordinasi Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Sistem BLC juga telah terintegrasi dengan sistem Orlitbangkes untuk konfirmasi kasus dengan data yang sudah dibersihkan dan di-cleaning oleh sistem surveilans dari Dirjen P2P Kementerian Kesehatan.

Selain itu, sistem BLC juga menghimpun integrasi data dari Aplikasi Peduli Lindungi, untuk melihat dan mencatat mobilitas penduduk yang didukung dengan model SDLC, yang akan diperuntukkan untuk mencatat pelaku perjalanan yang akan melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain.

### Target Penurunan Kasus 50 Persen

Implementasi sistem BLC untuk analisa sebagai landasan pemulihan Aktivitas Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 ini mengacu

pada 11 indikator dari pilar epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan juga pelayanan kesehatan.

Keseluruhan data sistem BLC tersebut kemudian dihimpun, diberikan bobot, dan dilakukan *scoring* untuk kemudian dijadikan landasan apakah sebuah daerah, sebuah wilayah memiliki resiko kenaikan kasus COVID rendah, sedang, atau tinggi.

"(Dari sistem BLC) kita dapat melihat data-data yang masuk, terutama dari Kementerian Kesehatan, lalu kami olah datanya, dibersihkan, dianalisis sehingga dapat kita lihat kapan puncak kasus positif terjadi," jelas Pakar Informatika Penyakit Menular dan Epidemiologi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah di Media Center Gugus Tugas, Graha BNPB, Sabtu (30/5/2020).

Dalam hal ini, pemerintah menargetkan penurunan kasus hingga 50 persen dengan pemantauan setiap minggu, termasuk kasus ODP dan PDP di tengah masyarakat. Selain dari jumlah kasus positif, Gugus Tugas juga memonitor data yang meninggal dunia, baik dari pasien positif, ODP maupun PDP setiap minggunya melalui sistem BLC.

"Target penurunan adalah 50 persen. Begitu juga dengan kasus ODP dan PDP, kita lihat berapa banyak jumlah penurunan kasusnya yang ada di masyarakat. Kami juga melihat dari jumlah orang yang meninggal, baik dari kasus pasien positif maupun meninggal dari pasien ODP

dan PDP. Semua juga sudah tercatat di dalam sistem," jelas Dewi.

Selanjutnya, hal yang harus dipantau adalah kenaikan kesembuhan di suatu wilayah. Kesembuhan berlaku untuk pasien positif dan yang kedua adalah untuk ODP yang selesai pemantauan atau PDP yang selesai pengawasan.

"Kita mengharapkan grafiknya terus menanjak ke depan. Selanjutnya adalah orang yang dirawat di rumah sakit, ini juga kita lihat berapa banyak orang yang dirawat: semakin turun jumlah orang yang dirawat, baik pasien positif maupun ODP dan PDP menunjukkan sebuah daerah memiliki kesiapan yang baik," kata Dewi.

Kemudian, Dewi juga menjelaskan bahwa hal yang harus dilihat adalah jumlah spesimen yang diperiksa oleh laboratorium. Dalam hal ini targetnya adalah sebanyak lima persen. "Targetnya adalah yang positif hanya 5%, jika yang positif mencapai 5% maka menunjukkan bahwa sudah baik, penularan yang ada di masyarakat dapat terkontrol dengan baik," ujar Dewi.

## 102 Wilayah Aman

Dari indikator tersebut, sudah ada 102 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menunjukkan dalam kondisi aman untuk pemulihan Aktivitas Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19.

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota,

Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

Kendati sudah dinyatakan aman, namun Dewi juga mengingatkan bahwa COVID-19 adalah penyakit yang sifatnya dinamis. Oleh sebab itu, dia meminta agar masyarakat dapat tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan di setiap lini sektor yang ada.

"Pada hari ini seseorang dapat berstatus ODP, kemudian hari menjadi positif, dan kemudian beberapa hari kemudian menjadi sembuh misalnya. Sifatnya sangat dinamis, dapat menyebar dengan sangat cepat, oleh sebab itu pesan dari saya adalah tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan di setiap lini sektor yang ada," pungkas Dewi.







# Suasana Ramadan 2020 saat COVID-19

---

Suasana Idulfitri saat Pandemi Covid 19. Salat Id tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama.





# Suasana Ramadan 2020 saat COVID-19

Masjid dikawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan menerapkan cara drive thru untuk penerimaan zakat.

Seorang warga membayar zakat dengan cara drive thru untuk mengurangi kontak langsung ditengah pandemi COVID-19





Penerimaan Zakat  
Fitrah tahun 2020  
menerapkan  
*social distancing*  
dimasa pandemi  
COVID-19.

Seorang warga  
menyerahkan  
zakat fitrah dengan  
menerapkan *social  
distancing* dimasa  
pandemi COVID-19





# Suasana Ramadan 2020 saat COVID-19

---

Warga melakukan silaturahmi di Hari Raya Idulfitri 1441 dengan sanak saudara di kampung halaman secara daring.

Warga melakukan ziarah kubur saat Hari Raya Idulfitri 1441 dengan menerapkan protokol COVID-19.



Warga Jakarta melakukan silaturahmi dihari raya Idulfitri 1441 dengan tetap menerapkan *social distancing*.





KOMINFO

# SELAMAT HARI RAYA IDULFITRI

1 Syawal 1441 H





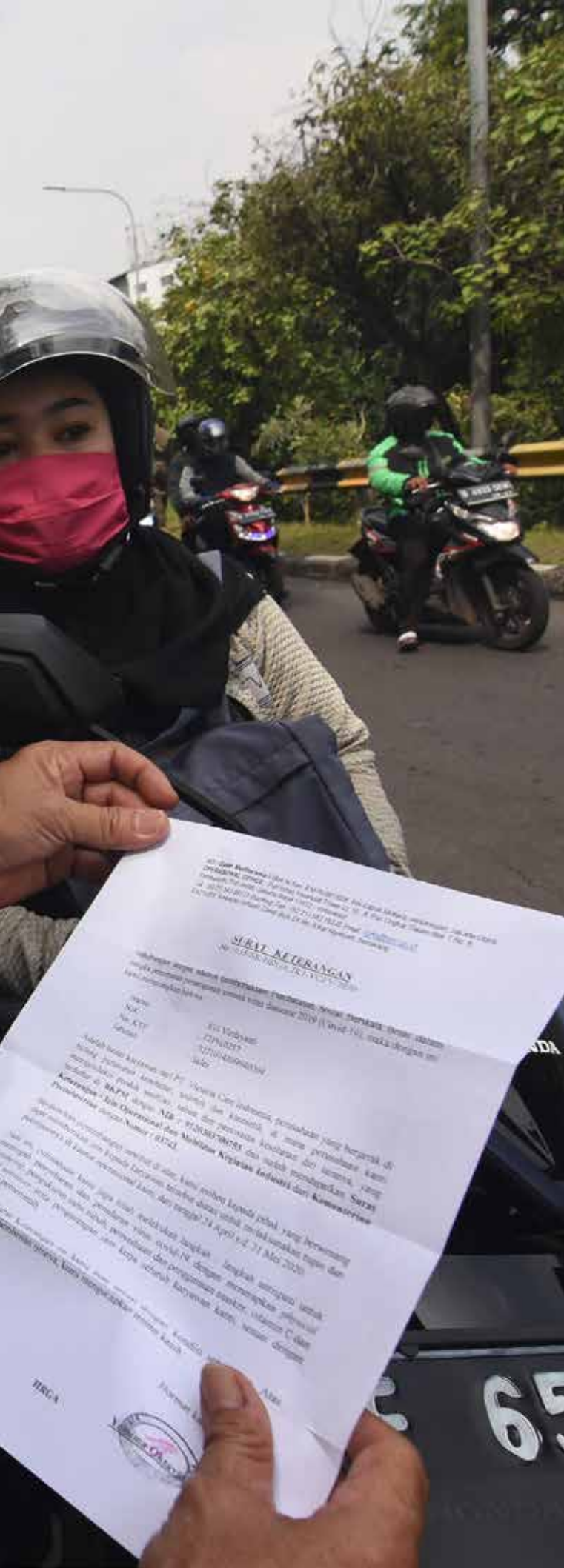
Suasana perayaan Idulfitri 1441 H di rumah para pegawai Kementerian Kominfo. Meski pandemi COVID-19 membuat tradisi mudik menjadi terbatas, namun silaturahmi antar kerabat tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan.

# Idulfitri 1441 H









# SIKM

## Syarat Masuk

## Wilayah DKI Jakarta

### Simak Penjelasan Berikut Ini

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menegaskan Surat Ijin Keluar-Masuk (SIKM) sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki oleh warga untuk keluar atau masuk ke wilayah Jakarta. Penetapan SIKM melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020.

SIKM bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta terhadap keterpaparan virus SARS-CoV-2. Berlakunya peraturan ini mendukung pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta.

Untuk mendapatkan SIKM, setiap individu terlebih dahulu mempelajari terkait persyaratan, mekanisme pelayanan, dasar hukum, definisi dan tata cara atau prosedur perizinan SIKM. Pemerintah DKI Jakarta menyediakan informasi pada laman [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id).

Benni mengatakan, "SIKM diproses secara online, namun beberapa sektor seperti konstruksi bisa dilakukan dengan sistem tanggungan. Misal seorang mandor dapat menanggung 20 tukang. Mandor yang membuat SIKM, atau mereka yang mempekerjakan tukang, dari pemilik rumah atau perusahaan."

Berikut ini beberapa langkah yang harus dilalui saat mengajukan permohonan perizinan SIKM.

# SIKM

1 pemohon mengunjungi website [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id). Lalu Pilih Urus Izin kemudian pemohon akan diarahkan ke laman JakEVO. Siapkan berkas persyaratan terlebih dahulu sebelum memulai permohonan perizinan, kemudian isi formulir permohonan dan unggah seluruh berkas persyaratan sesuai dengan format yang diminta.

2 JakEVO akan mengirimkan email kepada penjamin atau penanggung jawab untuk melakukan validasi atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Jika penjamin bersedia menjamin pemohon dan terikat dengan peraturan perundangan maka permohonan akan dilanjutkan permrosesannya.

3 Petugas DPMPPTSP Pemerintah DKI Jakarta melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis permohonan perizinan.

4 Jika permohonan perizinan SIKM disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. JakEVO akan mengirimkan surat elektronik ke email pemohon yang berisikan pemberitahuan SIKM telah diterbitkan disertai tautan untuk mengunduh SK Izin Keluar-Masuk Jakarta. Pemohon dapat mencetak izin secara mandiri.



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) DKI Jakarta Benni Agusandra mengatakan bahwa SIKM ini merupakan administrasi pelayanan bagi yang bekerja mereka terkait 11 sektor.

"Kesebelas sektor itu adalah kesehatan, bahan pangan energi, komunikasi dan IT, keuangan logistik perhotelan konstruksi industri strategis pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari," ucap Benni pada dialog penanganan COVID-19 di Media Center Gugus Tugas Nasional, Graha BNPB, Jakarta pada Kamis (28/5).





Pemohon dapat melakukan pengecekan untuk melihat proses pengajuan izin secara seketika atau real time dengan melihat pada menu Lacak Permohonan Anda dan pemohon dapat melihat pada tahapan proses pengajuan ijin yang sedang dilakukan.

Benni menyampaikan bahwa SIKM memiliki dua jenis, yaitu SIKM bersifat perjalanan berulang dan SIKM bersifat perjalanan sekali.

“SIKM perjalanan berulang untuk mereka yang berdomisili di DKI Jakarta namun tempat kerja atau tempat usaha berada di luar Jabodetabek atau mereka yang berdomisili di luar Jabodetabek, namun bekerja atau tempat usahanya di DKI Jakarta,” tambah Benni.

Benni mengingatkan masyarakat apabila melakukan pemalsuan surat dapat dikenakan hukuman paling lama 12 tahun sesuai Undang Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Tidak hanya itu, pemalsuan atau manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dikenakan pasal 263 KUHP.

Terkait dengan otentifikasi, SIKM telah dilengkapi dengan QR Code sehingga ini memudahkan petugas di lapangan dalam pengecekan surat.

Berdasarkan data Pemerintah DKI Jakarta per 27 Mei 2020, total pengguna berjumlah 259.813 berhasil mengakses perijinan SIKM dari laman [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id) dan tercatat 6.622 permohonan SIKM yang diterima. Dari total permohonan yang diterima tersebut, 64 permohonan yang masih dalam proses.

---

**Sumber :**

<https://covid19.go.id/p/berita/sikm-syarat-masuk-wilayah-dki-jakarta-simak-penjelasan-berikut-ini>

Antara Foto



# Baju APD Buatan Indonesia

Lolos ISO 16604 Class 3

**K**ebutuhan baju alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan para tenaga medis yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19 masih tinggi. Berita gembira diterima Gugus Tugas Nasional setelah baju APD buatan Indonesia lolos ISO 16604 Class 3. Diusulkan oleh PT Sritex, baju APD ini dinyatakan telah memenuhi standar internasional yang ditetapkan Badan PBB untuk Kesehatan Dunia (WHO).

Baju APD dengan standar tinggi atau ISO 16604 Class 3 merupakan spesifikasi yang wajib dikenakan para tenaga medis sehingga keamanan dan keselamatan terjamin. Hasil pengujian dilakukan oleh Intertek Headquarter yang berbasis di Cortland, New York, Amerika Serikat.

“Saya ikut senang mendengar kabar dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York, Arifi Saiman, bahwa pada 27 Mei 2020 waktu New York, hasil uji lab APD Coverall dan sampel bahan baju PT. Sritex untuk sertifikasi ISO 16604 Class 3 di Intertek HQ, Cortland, New York, dinyatakan Pass atau lolos uji lab,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, Doni Monardo pada Jumat (29/5/2020).

Baju APD bersertifikasi ISO 16604 Class 3 memiliki ketahanan terhadap masuknya bakteri atau virus dengan ukuran yang sangat kecil. ISO 16604 kategori kelas 3 berkualitas lebih tinggi dibandingkan tingkat kelas 2 atau ISO 16604 Class 2.

Gugus Tugas Nasional juga melaporkan bahwa beberapa perusahaan Indonesia lain sedang mengajukan permohonan untuk uji lab produk mereka. Konjen RI berharap agar produk-produk lain dapat lolos dan mendapatkan sertifikat ISO yang sama.

Sementara itu, Presiden Dirut PT Sritex Iwan Lukminto menjelaskan bahwa pihaknya bekerja khusus untuk mendapatkan formula bahan baku yang bisa memenuhi Standar WHO.

“Paling tidak satu bulan kami bekerja keras dan saya memimpin langsung pengembangan produk APD agar bisa mendapatkan ISO 16604 Class 3,” ujar Iwan. Menurut Iwan, Sritex mampu untuk memproduksi baju APD kelas 1 sampai 500 ribu buah setiap bulannya.

## **Lolosnya Baju APS dengan ISO 16604 Class 3 Menjawab Kebutuhan APD yang Tinggi untuk Penanganan Pasien Covid-19**

PT Sritex selama ini sudah mampu menghasilkan produk dengan standar tinggi. Iwan mengatakan bahwa salah satu yang sudah dihasilkan Sritex adalah pakaian nubika atau CBRN (*chemical, biological, radiological, and nuclear*). Sejak Januari lalu, Sritex membuat APD mulai yang Class 1, Class 2 dan terakhir ini Class 3.

Lolosnya baju APD dengan ISO 16604 Class 3 menjawab kebutuhan APD yang tinggi untuk penanganan pasien COVID-19. Ketersediaan baju APD tidak lagi akan menjadi kendala.

DIRJEN PPI :

# Pos dan Logistik Salah Satu Penyumbang Utama Selama PSBB

**J**akarta, Kominfo – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli mengatakan, industri pos dan logistik menjadi salah satu penyumbang utama perekonomian dan mendukung penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Sejak adanya PSBB ini belanja ritel online ada kenaikan sampai 400%, Kenapa? karena orang cenderung untuk belanja dari rumah, merasa lebih aman,” tutur Dirjen PPI dalam Webinar Kontribusi Pos dan Logistik dalam Mengatasi Pandemi COVID-19 (*The New Normal*) dari Jakarta, Rabu (20/05/2020).

Dirjen Ramli menjelaskan kenaikan aktivitas belanja online selama masa PSBB ini setidaknya dilihat dari tiga variabel utama, yakni penyediaan akses telekomunikasi, kantor pos dan pengantar barang atau kurir logistik serta *marketplace* atau pelaku UMKM itu sendiri.

“Kenaikan ritel belanja online khususnya di Indonesia, tidak terlepas dari tiga variabel tersebut, di mana sektor telekomunikasinya harus memiliki *quality of service*, aktivitas antar barang harus berjalan masif baik dari pos maupun kurir, begitu juga dengan *marketplace*,” paparnya.

### Kontribusi Era Normal Baru

Selain berkontribusi selama PSBB, pos dan logistik juga nantinya menjadi penyumbang utama pada saat memasuki *the new normal* atau kenormalan baru. Hal itu didasarkan pada imbauan WHO yang mengatakan bahwa COVID-19 akan sulit dikendalikan setidaknya dalam lima tahun mendatang.

Dirjen Ramli menyebutkan, kenormalan baru merupakan suatu era yang akan dihadapi bersama, “Jadi *new normal* itu adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul dalam fase pandemi dan pasca pandemi nanti,” ujarnya.

Menurut Dirjen PPI, jasa pos dan logistik di era normal baru akan berkompetisi pada *quality of service*, sehingga Kementerian Kominfo mengingatkan kepada semua industri agar lebih peduli terhadap kualitas pelayanannya.

“Apalagi dalam keadaan pandemi ini, itu relatif tidak akan dipilih lagi (apabila pelayanannya kurang baik). Oleh karena itu, *quality of service* menjadi utama,” imbuhnya

Webinar Kontribusi Pos dan Logistik dalam Mengatasi Pandemi COVID-19 (*The New Normal*) tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Kominfo bersama Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain Dirjen PPI Ahmad Ramli, Webinar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dan dibuka langsung oleh Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.



# Layanan Psikologi **SEJIWA**

## Hadir Sebagai Wadah Aduan Bagi Perempuan dan Anak Terdampak COVID-19

Jakarta (7/5) – “Diluncurkannya Layanan Psikologi Sehat Jiwa (SEJIWA) oleh Kantor Staf Presiden pada 29 April 2020 lalu, diharapkan dapat menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Menteri Bintang menuturkan, untuk menangani masalah tersebut, dibutuhkan penanganan profesional secara cepat dan terkoordinasi antar layanan. Hadirnya Layanan Psikologi SEJIWA merupakan hal yang sangat penting karena dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi, konsultasi dan pendampingan, khususnya terkait masalah perempuan dan anak di tengah pandemi COVID-19.





“

**Aplikasi ini diperuntukkan khususnya bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan mengalami masalah psikososial, seperti terancamnya kualitas kesehatan mental mereka, akibat rasa cemas, stress atau depresi, dan tekanan ekonomi yang ditimbulkan**

Bintang Puspayoga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

“Sesuai amanat Presiden RI, Joko Widodo pada rapat terbatas 29 Januari 2020, Kementerian PPPA telah diberikan tugas tambahan untuk menyediakan layanan rujukan nasional bagi isu-isu perempuan dan anak. Melalui layanan psikologi SEJIWA, Kementerian PPPA memberikan pendampingan bagi para perempuan dan anak yang terdampak COVID-19, seperti perempuan korban KDRT, perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus, perempuan pekerja migran, perempuan disabilitas, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus,” jelas Menteri Bintang.

Lebih lanjut Menteri Bintang menjelaskan, sebelumnya Kementerian PPPA telah menginisiasi gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (#BERJARAK) yang melibatkan pokja daerah di seluruh Indonesia untuk melindungi perempuan dan anak dari bahaya paparan COVID-19. “Ke depan kami akan membahas layanan SEJIWA ini secara intens dengan pokja daerah #BERJARAK yang sudah dibentuk. Sasarannya tidak hanya pada 10 aksi #BERJARAK, tapi bagaimana memberikan pelayanan maksimal melalui layanan SEJIWA dan program/kegiatan lain yang sudah Kementerian PPPA jalankan,” tegas Menteri Bintang.

Setelah seminggu diresmikan, Layanan SEJIWA telah menerima 344 aduan dari 2.978 panggilan yang diterima melalui 119 ext. 8, dengan rasio panggilan transfer sebesar 11,55% (Data Laporan Performansi NCC 119 PT. Telkom Indonesia). Melihat data tersebut, Plt. Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan menuturkan bahwa total aduan dari masyarakat melalui layanan SEJIWA ini masih sangat rendah.

“Untuk itu, diperlukan upaya antisipasi seperti menambah jumlah psikolog yang melayani; memastikan relawan psikolog mampu mengidentifikasi korban kekerasan yang kemudian dirujuk ke Kementerian PPPA; menentukan kode pertolongan untuk korban KDRT, kekerasan seksual, dan kekerasan anak, contohnya kode “Ask Angela” untuk korban kekerasan seksual; mempertimbangkan upaya pengaduan KDRT selain dari sistem yang sudah ada; dan perlu disiapkan kanal aduan jika terjadi kendala teknis dan non teknis dalam layanan ini,” tegas Abetnego.

Saat ini, Kementerian PPPA telah menyusun mekanisme pelayanan SEJIWA sesuai dengan prosedur dan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Masyarakat dapat konsultasi dengan tenaga psikolog melalui hotline 119 ext. 8 (delapan) yang juga merujuk kepada *hotline* unit pengaduan Kementerian PPPA yaitu 0821-2575-1234/ 0811-1922-911 atau melalui *web browser* <http://bit.ly/kamitetapada>, dan surat elektronik (*email*) [pengaduan@kemenpppa.go.id](mailto:pengaduan@kemenpppa.go.id).

*Hotline* layanan SEJIWA juga terhubung dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)/ P2TP2A serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Forum Pengada Layanan (FPL) yang ada di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, sesuai lokasi pelapor berada.

Pada rangkaian acara webinar, Menteri Bintang menyampaikan apresiasi tinggi kepada PT. Telkom, Tbk. yang telah bersedia menyediakan perangkat *hotline*, juga kepada HIMPSI yang telah menyediakan SDM profesional (Psikolog) dalam Layanan SEJIWA, serta mendampingi dan memberikan pelatihan penguatan kapasitas bagi relawan, baik kepada 36 tenaga psikolog Kementerian PPPA hingga tenaga psikolog tingkat daerah.

"Melalui webinar ini, saya meminta kepada seluruh Kepala Dinas PPPA untuk menugaskan Kepala Unit Layanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar dapat menerima dan menindaklanjuti setiap aduan yang masuk, sesuai dengan mekanisme layanan yang berlaku. Selanjutnya, ikut memastikan semua aduan dilayani dengan sebaik-baiknya dan dipantau hingga proses terminasi," tegas Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga meminta seluruh lembaga/institusi penyedia layanan dan para pakar, untuk bersama-sama memberikan layanan terbaik bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak. "Hal ini dapat terwujud, jika kita semua berkerja sama dan saling membantu untuk melakukannya. Saya optimis, layanan ini akan menjadi batu loncatan sangat penting bagi pemenuhan hak psikososial perempuan dan anak, apalagi dengan semangat dan sinergi yang kita bangun bersama," tutup Menteri Bintang.

---

**Sumber :**

Publikasi Dan Media, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Unsplash

# SEJIWA

## LAYANAN PSIKOLOGI UNTUK SEHAT JIWA

HOTLINE :

**119** ext.8

Tekanan psikologi seperti depresi bisa saja terjadi pada masa pandemi seperti ini.

Kondisi ini berisiko sebabkan kasus KDRT dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat.

Untuk membantu penanganan potensi ancaman tekanan psikologi,

**SEJIWA**

hadir sebagai layanan konsultasi bagi perempuan dan anak secara gratis.



# Cara Mudah Siapkan Dana Kebutuhan Keluarga Saat #LawanCovid19

Sisters, Ramadan dan Lebaran sebentar lagi tiba. Tapi, tahun ini situasinya akan terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya lantaran COVID-19. Imbas virus ini terhadap keuangan keluarga cukup membuat hampir semua orang pusing tujuh keliling. Kondisi keuanganmu saat ini mungkin sedang 'ketat' atau 'kering' karena efek kebijakan WFH (*work from home*) atau kelesuan ekonomi. Sementara itu, pengeluaran untuk biaya hidup, sekolah, hingga cicilan bulanan terus berjalan.

Lalu apa yang sebaiknya dilakukan di tengah situasi sulit seperti saat ini?

## 1. Mulailah Mencatat Keuangan Kebutuhan Keluarga

Sisters, membuat catatan anggaran keuangan di saat krisis itu penting supaya kita mendapat gambaran dengan jelas apa saja yang dibutuhkan dan berapa biayanya selama masa di rumah saja.

Lakukan simulasi hitungan biaya hidup selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Upayakan belanja kebutuhan pokok seminggu sekali dan usahakan memilih belanja *online* ketimbang *offline* guna meminimalisir kontak dengan orang lain di luar rumah.

Berikan urutan pengeluaran berdasarkan prioritas. Caranya, tempatkan urutan teratas adalah pos biaya yang paling penting, lalu diurutkan paling bawah adalah biaya yang tidak begitu penting dan sifatnya opsional.

Setelah membuat urutan pos-pos keuangan, tentukan juga bujet atau anggaran yang diperlukan. Dari sini, kamu bisa mengetahui berapa kisaran dana yang dibutuhkan selama situasi COVID-19 berlangsung. Selanjutnya, cek sumber dana/ biayanya. Apakah kamu memiliki cukup uang tabungan/ simpanan dana darurat? Atau, kondisinya kamu tak punya tabungan sama sekali dan hanya mengumpulkan gaji bulanan saja?

## 2. Miliki Dana Yang Cukup Untuk Kebutuhanmu dan Keluarga

Ada kalanya dalam hidup kita dihadapkan dengan situasi sulit, serba tak terduga. Seperti situasi yang terjadi saat ini saat kamu tak pernah menyangka bahwa serangan virus corona bisa membuat kamu dan keluarga harus tetap berada di rumah saja.

Dari sisi finansial, kamu juga pasti tak siap dengan perubahan akibat corona. Padahal selama ini kamu sudah berhemat dan mengelola uang dengan baik supaya bisa menabung dana darurat namun tetap kurang atau belum cukup.

Ingat kamu tak perlu panik maupun bersedih. Hadapi semuanya dengan tegar dan percaya pandemi ini akan segera berlalu dan semuanya akan kembali normal. Yang terpenting, saat ini lindungi diri dan keluarga dengan baik dan nyaman selama ramadhan dan lebaran di rumah saja, Sisters.

Sumber: <https://www.sisternet.co.id/read/282283-cara-mudah-siapkan-dana-kebutuhan-keluarga-saat-lawancovid19>

# Investasi Saham Saat Pandemi Kenapa Nggak?

Sisters, kondisi pandemi seperti ini selain menjaga kesehatan diri, jangan lupa jaga kesehatan keuanganmu. Pastikan kondisi keuangan tetap sehat, tabungan dan investasi terjaga. Tapi tahukah kamu jika saat ini termasuk momen yang tepat untuk nabung saham. Kenapa dibilang tepat? Sebab, ada banyak saham-saham 'potensial' dengan harga 'diskon' akibat virus corona.

Nah, disinilah peluangmu untuk investasi saham. Kamu bisa beli saham dengan harga murah, dan menikmati hasil *cuan* investasimu di masa depan. Tapi, jangan sembarangan investasi biar tidak merugi. Kamu perlu tahu strategi aman berinvestasi saham ketika virus corona merebak. Apa saja itu?

## 1. Terapkan Mindset Investasi Jangka Panjang

Niatkan dirimu membeli saham untuk investasi jangka panjang (*long term*) yakni lebih dari lima tahun. Semakin lama semakin bagus. Ingat, *cuan* atau untung dari investasi saham akan lebih terasa dalam jangka panjang. Jadi, ciptakan *mindset* untuk menjadi investor jangka panjang demi masa depan keuangan yang lebih baik.

Keuntungan yang didapatkan ketika kamu berinvestasi *long term* ialah kamu tak perlu pusing dengan dampak *short term* virus corona yang menyebabkan ekonomi hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan. Kamu juga akan lebih diuntungkan karena gara-gara corona harga saham turun, jadi lebih murah. Justru disini kamu bisa membeli banyak saham yang memiliki potensi kenaikan di masa mendatang.

Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan. Kamu juga akan lebih diuntungkan karena gara-gara corona harga saham turun, jadi lebih murah. Justru disini kamu bisa membeli banyak saham yang memiliki potensi kenaikan di masa mendatang.

Dalam berinvestasi, usahakan untuk konsisten menabung saham. Biasakan diri menyisihkan pendapatan sebesar 10-15% untuk beli saham setiap bulannya, Sisters

## 2. Beli Saham Fundamental Kuat

Sebagai investor, membeli saham juga tak boleh sembarangan. Ada strateginya sebab tidak selamanya saham-saham 'murah' itu bagus lho! Pastikan kamu tidak tergiur membeli saham karena harganya murah banget.

Di sikon seperti sekarang ini, strategi yang dianjurkan ketika menabung saham adalah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membeli saham. Tipsnya, belilah saham-saham yang masuk kategori *under value* tapi memiliki fundamental yang bagus. Lalu, cek juga apakah saham-saham tersebut masuk dalam sektor- sektor saham yang berpotensi naik pasca COVID-19 mereda.

## 3. Tingkatkan Ilmu Investasi dan Sabar

Kunci sukses meraup *cuan* dari investasi saham adalah menerapkan strategi investasi yang tepat dan sabar. Untuk piawai dalam berinvestasi, asah kemampuanmu seputar saham secara gratis dengan mengikuti training edukasi bersama pakar saham, seperti belajar analisis fundamental dan analisis teknikal saham.

Sumber : <https://www.sisternet.co.id/read/282286-investasi-saham-saat-pandemi-kenapa-nggak>

